

ALASAN KANADA MEMASUKKAN ASPEK GENDER DALAM CANADA- INDONESIA TRADE AND PRIVATE SECTOR ASSISTANCE 2014-2019

Martha Damai Mayasari

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRAK

This paper seeks to explain why Canada included gender aspects in its assistance to Indonesia through Canada-Indonesia Trade and Private Sector Assistance (TPSA). Previously, the assistance provided by Canada to Indonesia was not too focused on gender equality. However, over time Canada has become more vigorous in voicing values towards gender equality, one of which is through assistance provided by Canada. Using the theory of the decision-making process by Richard C. Snyder, HW Bruck, and Burton Sapin and assisted with the concept of feminist foreign policy, gender mainstreaming and international regimes, Canada's decision to include gender aspects in TPSA is influenced by internal factors namely the high influence of feminism in non-institutions - government, government agencies and the Canadian community as well as external factors, namely the existence of gender inequality in Indonesia and the existence of an international regime that was followed by Canada and Indonesia.

Keywords: Canada, feminist foreign policy, gender mainstreaming, TPSA, international regime

Pendahuluan

Kanada mulai mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia melalui Colombo Plan selama 1950-an. Selama tiga puluh tahun antara 1967 dan

2007, Kanada memberikan bantuan kepada Indonesia dalam pengaturan koordinasi internasional yang didirikan di bawah Kelompok Antar-Pemerintah untuk

Indonesia dan Kelompok Konsultatif untuk Indonesia. Sebagai mitra pembangunan, Kanada bekerja erat dengan Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mengurangi kerentanan terhadap kemiskinan. Canadian International Development Agency (CIDA) mengelola program bilateral Kanada untuk bantuan pembangunan ke Indonesia hingga dimasukkan dalam urusan Global Affairs Canada. CIDA menjadikan Indonesia sebagai "negara konsentrasi" utama bagi kerja sama pembangunan Kanada, dengan Indonesia menempati peringkat kedua sebagai penerima bantuan Kanada pada 1980-an.

Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia menunjukkan investasi Kanada di Indonesia untuk periode 2005 hingga 2011 terdiri dari 37 proyek senilai US \$ 157 juta. Jumlah terbesar proyek investasi Kanada ada di pulau Jawa, tetapi nilai investasi dolar terbesar terletak di Sulawesi. Pada mulanya proyek investasi yang dilakukan oleh Kanada di Indonesia samata-mata untuk meningkatkan perekonomian kedua Negara, namun seiring berjalannya waktu Kanada mulai memasukkan nilai-nilai yang mereka miliki dalam setiap bantuan atau kerjasama yang mereka buat. Salah satunya yakni memasukkan aspek gender.

(Embassy of The Republic of Indonesia, 2018)

Kerjasama perdagangan dan investasi antara Kanada dan Indonesia pada mulanya tidak terlalu berfokus pada aspek gender meskipun telah memasukan ide-ide tersebut. Ide untuk memasukan aspek gender pada awalnya sudah mulai terlihat pada proyek yang dilakukan oleh Kanada yakni *Canadian Market Access and Trade Capacity Building*. Proyek tersebut berjalan pada tahun 2009 sampai 2013 yang dilakukan bersama lima negara lain yakni Indonesia, Ekuador, Guyana, Burkina-Faso, dan Haiti. Dalam proyek tersebut salah satu *policy maker* yang terlibat yaitu mengenai *gender equality*. Meskipun telah memasukan ide tersebut, namun proyek ini tidak berfokus langsung hanya kepada perempuan saja, tapi secara umum. Dari adanya proyek tersebut salah satu hasilnya menunjukkan bahwa hasil dari pengembangan kapasitas perdagangan dan layanan tautan yang disediakan untuk lima negara mitra, menunjukkan bahwa 39% perusahaan kecil atau menengah dipimpin oleh perempuan telah meningkatkan penjualan atau meningkatkan kapasitas untuk terlibat dalam perdagangan. (UNIDO, 2013)

Memasuki era globalisasi, peranan perempuan bukan hanya sebagai pendamping pria atau hanya mengurus

rumahtangga. Kaum perempuan pada era globalisasi ini juga harus bersosialisasi dengan masyarakat dan mengembangkan karirnya. (Djelantik, 2009)

Canada- Indonesia Trade and Private Sector Assistance(TPSA) merupakan sebuah proyek yang dilakukan oleh Kanada dan Indonesia melalui Global Affairs Canada bersama Kementerian Perdagangan RI. Program bantuan pembangunan yang dilakukan oleh Kanada kepada Indonesia ini menganggarkan dana senilai C\$12,550,000.00 dengan jenis keuangan berupa hibah bantuan tidak termasuk reorganisasi hutang. Jenis bantuan pembangunan ini yakni intervensi tipe proyek. Bantuan ini bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi untuk usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia, dengan fokus pada yang dimiliki dan dioperasikan oleh perempuan. Proyek bantuan ini selain bekerjasama dengan pemerintah Indonesia juga bekerjasama dengan berbagai kalangan seperti organisasi sektor swasta, dan pakar kebijakan perdagangan untuk mengatasi hambatan yang dialami oleh pelaku UKM. Proyek ini juga menyediakan layanan konsultasi yang ditargetkan untuk mengembangkan peluang komersial bagi UKM Indonesia yang menjanjikan. Ini mempromosikan peluang investasi Kanada di Indonesia melalui riset pasar dan pertukaran antara komunitas bisnis Kanada

dan Indonesia. Hasil yang diharapkan untuk proyek ini meliputi: (1) peningkatan peluang perdagangan dan investasi yang berkelanjutan dan responsif gender, khususnya untuk usaha kecil dan menengah (UKM), antara Indonesia dan Kanada; dan (2) meningkatnya penggunaan analisis perdagangan dan investasi dan reformasi peraturan oleh para pemangku kepentingan Indonesia untuk memperluas kemitraan perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Kanada. (Canada, 2019)

Gender Mainstreaming (Pengarutamaan Gender) adalah strategi yang diterima secara global untuk mempromosikan kesetaraan gender. Pengarusutamaan bukanlah tujuan itu sendiri tetapi strategi, pendekatan, sarana untuk mencapai tujuan kesetaraan gender. Pengarusutamaan melibatkan memastikan bahwa perspektif dan perhatian gender terhadap tujuan kesetaraan jender adalah penting untuk semua kegiatan - pengembangan kebijakan, penelitian, advokasi / dialog, perundang-undangan, alokasi sumber daya, dan perencanaan, implementasi dan pemantauan program dan proyek. (United Nations). Pengarusutamaan gender memerlukan tiga komitmen praktis utama: Integrasi kesetaraan gender dalam intervensi secara umum, menargetkan kelompok atau isu spesifik melalui intervensi khusus, dialog

dengan mitra tentang isu dan aspek peka gender. (Brown, Huckerby, & Shepher, 2019)

Program proyek bantuan responsive gender dalam bantuan ini yakni diantaranya seperti:(1) TPSA bersama *Angel Investment Network Indonesia* (ANGIN) mengadakan lokakarya pelatihan pemasaran digital dan akses modal untuk UKM yang dipimpin perempuan; (2) proyek TPSA menyelenggarakan lokakarya tentang kepekaan gender dalam analisis rantai nilai; (3) TPSA dan Fairtrade mendukung forum perempuan

Pembahasan

Minat Kanada dalam memberikan bantuan pembangunan atau bantuan asing awalnya berasal dari keinginan untuk membantu negara-negara Eropa membangun kembali diri mereka sendiri secara ekonomi setelah Perang Dunia II. Kanada dan Amerika Serikat adalah satu-satunya dua negara yang muncul dari perang dengan ekonomi 1 yang sebenarnya telah diperkuat. Akibatnya, pemerintah Kanada memutuskan untuk memberikan bantuan kepada negara-negara dimana Kanada merasakan ikatan emosional dengan, misalnya, Inggris Raya. Karena bantuan pembangunan Kanada pada hari-hari pasca-Perang Dunia II diarahkan pada rekonstruksi Eropa, bantuan untuk negara-negara Dunia Ketiga yang baru merdeka tidak dimulai sampai akhir 1940-an dan

dalam kopersiserta mengadakan lokakarya pelatihan untuk pelatih tentang kesetaraan gender dan kepemimpinan perempuan. (TPSA) Berdasarkan uraian diatas, tujuan dari tesis ini dibuat untuk menjelaskan faktor di balik Kanada memasukkan aspek gender pada bantuan pembangunannya ke Indonesia sebagai periode 2014-2019.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam karya tulis ini adalah metode kualitatif yang bersifat eksplanatif dan paradigma yang digunakan adalah Studi Kasus.

awal 1950-an. Perserikatan Bangsa-Bangsa meluncurkan program bantuan teknis di mana Kanada berpartisipasi. Program Bantuan Teknis PBB yang diperluas mengadakan pertemuan di Ottawa. (Weert, 1979)

Badan bantuan pembangunan Pemerintah Kanada, *Canadian International Development Agency* (CIDA) mendukung pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia untuk mengurangi kemiskinan dan memastikan kontribusi Kanada terhadap dunia yang aman dan makmur. CIDA didirikan pada tahun 1968 untuk mengelola sebagian besar program bantuan pembangunan resmi Kanada. (WHO, 2019)

Canada merupakan salah satu negara yang saat ini gencar melakukan promosi

terhadap adanya nilai kesetaraan gender. Hal tersebut dapat dilihat dari sejarah kejadian penting dimana Kanada menunjukkan komitmennya mengenai nilai tersebut. Dalam pemerintahan Kanada, pada tahun 1970-an Posisi Menteri yang bertanggung jawab atas *Status of Women* diciptakan. Diikuti dengan tahun 1980-an CEDAW diratifikasi dan *Canadian Charter of Rights and Freedoms* menjamin hak yang sama diadopsi. Beijing Declaration and Platform for Action 1990-an diadopsi dan komitmen dibuat untuk melakukan GBA pada semua undang-undang, kebijakan, dan program. Pada tahun 2000an Komite Tetap tentang *Status of Women* (FEWO) dibentuk di Parlemen. Pemerintah Federal menunjuk Kabinet paritas gender pertama kalinya pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 Pemerintah Federal berkomitmen untuk analisis berbasis gender tentang langkah-langkah anggaran di semua anggaran masa depan. (OECD, 2018)

Komitmen Kanada untuk memajukan kesetaraan gender ditunjukkan dengan adanya pemberdayaan perempuan dan anak perempuan, serta promosi dan perlindungan hak asasi manusia mereka. Komitmen tersebut dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa kesetaraan gender memiliki peran yang besar dalam pembangunan suatu Negara. Kesetaraan gender berkontribusi pada pertumbuhan

ekonomi berkelanjutan jangka panjang, kemajuan sosial, pembangunan berkelanjutan dan pembangunan nasional, politik, sosial, budaya dan ekonomi. Kanada berkomitmen untuk mempromosikan nilai-nilai utama Kanada ini melalui bantuan pembangunan internasional, advokasi diplomatik serta kebijakan dan layanan perdagangan. Memajukan kesetaraan gender adalah jantung dari bantuan internasional Kanada. Semua kebijakan dan program pembangunan Kanada bertujuan untuk memberdayakan perempuan dan Kanada menerapkan proyek spesifik untuk mencapai tujuan ini.

Bantuan Pembangunan Kanada Dan Implementasinya terhadap Indonesia

Kanada memberikan bantuan pembangunan kepada Indonesia sejak abad ke-20 hingga sekarang, dan ada juga kemitraan pembangunan. Bantuan pembangunan Kanada memiliki beberapa fokus, dan dalam bab ini, Kanada telah berkomitmen untuk memberikan bantuan pembangunan untuk mengatasi masalah gender. Salah satu bantuan yang diberikan oleh Kanada dan yang akan di bahas dalam tulisan ini yakni mengenai *Canada-Indonesia Trade and Private Sector Assistance 2014-2019*. Bantuan pembangunan ini diberikan untuk mendorong peran perempuan dalam kegiatan ekonomi yakni perdagangan dan

investasi antara Kanada dan Indonesia. Bantuan pembangunan yang didanai Pemerintah Kanada melalui Global Affairs Canada dan dilaksanakan oleh The Conference Board of Canada. Mitra pelaksana utamanya adalah Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN), Kementerian Perdagangan Indonesia. Proyek ini juga bekerja sama dengan BKPM.

Kerjasama perdagangan dan investasi antara Kanada dan Indonesia pada mulanya tidak terlalu berfokus pada aspek gender meskipun telah memasukkan ide-ide tersebut. Ide untuk memasukkan aspek gender pada awalnya sudah mulai terlihat pada proyek yang dilakukan oleh Kanada yakni *Canadian Market Access and Trade Capacity Building*. Proyek tersebut berjalan pada tahun 2009 sampai 2013 yang dilakukan bersama lima negara lain yakni Indonesia, Ekuador, Guyana, Burkina-Faso, dan Haiti. Dalam proyek tersebut salah satu *policy maker* yang terlibat yaitu mengenai *gender equality*. Meskipun telah memasukkan ide tersebut, namun proyek ini tidak berfokus langsung hanya kepada perempuan saja, tapi secara umum. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan layanan dukungan perdagangan yang tersedia untuk eksportir usaha kecil dan menengah (UKM) di negara-negara ini serta untuk membangun kapasitas UKM terpilih untuk

meningkatkan daya saing perdagangan mereka dan membangun kontak yang memungkinkan peningkatan ekspor dan pertumbuhan lapangan kerja. Dari adanya proyek tersebut salah satu hasilnya menunjukkan bahwa hasil dari pengembangan kapasitas perdagangan dan layanan tautan yang disediakan untuk lima negara mitra, menunjukkan bahwa 39% perusahaan kecil atau menengah dipimpin oleh perempuan telah meningkatkan penjualan atau meningkatkan kapasitas untuk terlibat dalam perdagangan. (UNIDO, 2013)

Canada- Indonesia Trade and Private Sector Assistance (TPSA) merupakan sebuah proyek yang dilakukan oleh Kanada dan Indonesia melalui Global Affairs Canada dengan badan pelaksana yakni Conference Board of Canada bersama Kementerian Perdagangan RI. Proyek ini bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi untuk usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia, dengan fokus pada yang dimiliki dan dioperasikan oleh perempuan. (Canada, 2019) Conference Board of Canada telah bekerja di bidang kerjasama internasional, Perdagangan, dan Kebijakan Investasi selama lebih dari 25 tahun. Pekerjaan ini telah menjadi cara terbaik bagi Conference Board of Canada untuk mengembangkan wawasan tentang manajemen dan kinerja organisasi dalam konteks global. Pada saat

yang sama, kegiatan ini telah mendukung tujuan pembangunan internasional Kanada. Pengalaman tersebut telah memungkinkan untuk menambah keahlian domestiknya dan memanfaatkannya untuk keuntungan anggota. Tugas dari Conference Board of Canada yakni penyampaian pengetahuan berdasarkan penelitian yang cermat oleh tim profesional multidisiplin, manajemen proyek dan pengiriman acara jejaring dan proses konsultasi kelompok besar dengan fokus pada masalah perdagangan dan investasi serta manajemen proyek dari proyek-proyek yang didanai oleh bagian pengembangan Global Affairs Canada (GAC). Sebagian besar proyek berfokus pada pembangunan kapasitas internasional dalam mendukung reformasi perdagangan, ekonomi, kebijakan publik, dan tata kelola. (Conference Board of Canada)

Menurut temuan penelitian yang dilakukan oleh TPSA di Indonesia menemukan bahwa bahwa perempuan pengusaha, menghadapi peran ganda karena diharuskan untuk membagi waktu antara menjalankan bisnis dan mengelola rumah tangga mereka. Kondisi ini menjadi tantangan bagi perempuan untuk memiliki akses sumber daya ekonomi dan peluangnya. Para perempuan pengusaha juga memiliki keterbatasan waktu untuk menemukan dan menjalin hubungan dengan jaringan bisnis di mana mereka dapat mengakses informasi pasar dan

penyedia layanan. Selanjutnya, studi juga menemukan bahwa perempuan cenderung memilih tidak mencari sumber modal dari perbankan karena suku bunga tinggi, antara 12 hingga 15 persen; persyaratan agunan tinggi, setidaknya 30 persen dari jumlah pinjaman; prosedur yang memakan waktu; serta jadwal pembayaran yang tidak sesuai. Akses terhadap modal adalah salah satu kendala yang dihadapi oleh pemilik perempuan UKM untuk meningkatkan bisnis yang mereka jalani. (Kemendag, 2018)

Proyek TPSA bertujuan untuk mengidentifikasi dan membantu mengatasi hambatan perdagangan yang ada antara Kanada dan Indonesia, dalam proses pengentasan kemiskinan di Indonesia dan menghasilkan manfaat bagi perusahaan Kanada. Proyek pembangunan ini mengumpulkan dan menyebarkan informasi perdagangan dan investasi Indonesia dan Kanada serta praktik-praktik pengaturan untuk membantu meningkatkan arus perdagangan dan investasi antara kedua negara. Selain itu bantuan pembangunan ini juga melakukan penelitian dan pelatihan tentang cara meningkatkan perdagangan dan investasi antara Kanada dan Indonesia, termasuk mengidentifikasi industri-industri prioritas. TPSA menyiapkan laporan intelijen pasar dan ringkasan produk dan Conference Board of Canada akan menjadi tuan rumah

dan melatih pekerja magang Indonesia di bawah sponsor TPSA. TPSA bermitra dengan lembaga *think tank* dan institusi akademik Kanada dan Indonesia dalam isu-isu terkait perdagangan dan meningkatkan hubungan bisnis sektor swasta antara Indonesia dan Kanada, terutama untuk UKM. Proyek TPSA memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kerangka peraturan untuk perdagangan dan investasi antara Kanada dan Indonesia. (Conference Board of Canada)

Capaian TPSA untuk Mengatasi Masalah Gender di Indonesia

Proyek TPSA merupakan proyek pembangunan yang menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan lima komponen vital. Komponen tersebut bertujuan untuk meningkatkan kegiatan perdagangan Indonesia, lima komponen tersebut yakni fasilitas perdagangan, promosi investasi, reformasi regulasi, kesetaraan gender serta keberlanjutan lingkungan. (TPSA) Dalam penelitian ini penulis akan berfokus pada kegiatan yang dilakukan oleh TPSA yang mengandung komponen kesetaraan gender. Proyek bantuan ini telah berjalan dari tahun 2014 hingga 2019 dan telah aktif melakukan kegiatan yang mendorong tujuan yang diinginkan. Kegiatan-kegiatan lalu yang telah dipublikasikan oleh TPSA berjumlah 171 kegiatan. (TPSA)

Untuk memaksimalkan dampak pengurangan kemiskinan dari peningkatan perdagangan dan investasi antara Kanada dan Indonesia, proyek TPSA berfokus pada usaha kecil dan menengah (UKM), termasuk yang dimiliki atau dijalankan perempuan. Setelah analisis ekstensif, TPSA memilih fokus pada tiga komoditas yang memiliki peluang besar sukses di pasar Kanada: kopi, alas kaki, dan pakaian jadi. Pilihan ini didasari kriteria berikut: potensi pertumbuhan pasar global dan Kanada untuk komoditas tersebut, hambatan perdagangan yang ada, kebijakan sektoral Indonesia, sejauh mana kegiatan proyek pada komoditas itu akan berdampak pada pengurangan kemiskinan, sejauh mana komoditas itu akan menghasilkan pekerjaan stabil yang membayar upah secara adil, sejauh mana proyek dapat meningkatkan capaian gender pada komoditas itu, dan sejauh mana praktik ekonomi umum pada komoditas itu menghasilkan dampak lingkungan merugikan yang signifikan.

Faktor Internal

Kanada memasukkan aspek gender dalam bantuan *Canada-Indonesia Trade and Private Sector Assistance 2014-2019* dipengaruhi oleh adanya faktor internal dan eksternal dalam proses pengambilan keputusannya. Seperti yang ditunjukkan

dalam diagram diatas, faktor internal yang mempengaruhi keputusan tersebut yakni adanya *feminist politicians* didalamnya. Semenjak pergantian presiden Kanada dipimpin oleh Justin Trudeau, Kanada dikenal dengan pemerintahannya yang feminis. Dalam pemerintahannya saat ini, kabinetnya dirancang dengan jumlah perempuan dan laki-laki yang sama untuk mempertegas mengenai kepercayaan feminisnya. Selain itu, Chrystia Freeland selaku menteri perempuan yang menjabat sebagai menteri luar negeri Kanada, mengatakan bahwa akan mengejar kebijakan feminis di dalam dan luar negeri untuk mencerminkan negara yang menjunjung tinggi kesetaraan gender. *Canadian Charter of Rights and Freedoms* dan *Canadian Human Rights Act* menguraikan kewajiban hukum untuk memastikan kesetaraan gender di Kanada. Setiap kebijakan dan kegiatan memiliki perspektif atau implikasi gender. Hal ini menjadi salah satu faktor penting yang mendorong pemerintah Canada untuk melakukan perubahan dan perbaikan mengenai kesetaraan gender baik untuk dalam maupun luar negeri. Kebijakan ini merupakan perwujudan dari landasan konstitusional Kanada dan menganggap hal tersebut merupakan kebutuhan Kanada. Terkait dengan masalah ini, Kanada dibawah Justin Trudeau menargetkan kesetaraan gender dan

pemberdayaan perempuan dan anak perempuan. Kanada tahu bahwa memberdayakan perempuan, di luar negeri dan didalam negeri, membuat keluarga dan negara lebih sejahtera. (Government of Canada, 2017)

Struktur dan perilaku sosial sebenarnya menjadi bagian dari pengaturan internal. Hal ini bermula dengan adanya *women's movements* yang terjadi di Kanada. Sejak akhir tahun 1800-an gerakan perempuan ini semakin gencar menyuarakan hak-hak perempuan di area public. Hingga April 1940 untuk hak mereka untuk memilih dan mencalonkan diri dalam pemilihan. Kemudian dilanjutkan dengan adanya gelombang kedua selama periode 1960-85 - sering disebut sebagai feminisme gelombang kedua - termasuk kampanye untuk mendukung perdamaian dan pelucutan senjata, kesetaraan dalam pendidikan dan pekerjaan, kontrol kelahiran dan mengakhiri kekerasan terhadap perempuan. Hubungan ini adalah alasan mengapa gerakan perempuan dapat mempengaruhi pengaturan internal pengambilan keputusan dalam kebijakan luar negeri Kanada. Diantaranya yakni melalui *Department Women and Gender Equality Canada (WAGE)*, *Federated Women's Institutes of Canada*, *Canadian Women's Foundation* dan *The National Council of Women of Canada (NCWC)*. Institusi tersebut mengurus mengenai

perempuan dimana mereka memiliki perwakilannya di institusi negara seperti di *House of commons* untuk menyampaikan aspirasi hak-hak perempuan. Pengaruh pengaturan internal berasal dari politik domestik dan opini publik. Dimana nilai yang dimiliki oleh masyarakat Kanada yakni adanya kesetaraan, rasa hormat, keamanan, kedamaian, dan kesopanan. Komitmen utama Rencana Federal adalah untuk "menerapkan analisis berbasis gender di seluruh departemen dan lembaga federal". (Government of Canada, 2017)

Proses pengambilan keputusan adalah keputusan Kanada untuk memasukkan aspek gender pada bantuan di bidang ekonomi yakni perdagangan dan investasi ke Indonesia. Pemerintah Kanada menjadi pengambil keputusan selama proses memasukkan aspek gender pada bantuan tersebut. Melihat realitas dilapangan mengenai hambatan yang dirasakan oleh wirausaha UKM pelaku kaum perempuan yakni keterbatasannya akses yang dimiliki, Kanada menyediakan program untuk Indonesia yang berfokus pada perdagangan dan investasi melalui input aspek gender dengan melakukan pemberdayaan perempuan. *Canada-Indonesia Trade and Private Sector Assistance* (TPSA) sebagai tindakan pemerintah Kanada dalam komitmennya untuk memiliki aspek

gender dalam mempermudah dan membantu perempuan dalam akses perdagangan dan investasi kedua negara.

a. *Non-human environment*

Faktor internal pertama yang mempengaruhi keputusan Kanada dalam memberikan bantuan pembangunan kepada Indonesia melalui *Canada-Indonesia Trade And Private Sectors Assistance* adalah dari aspek *non-human environment*. *Non-human environment* yang dimaksud yakni adanya sebuah konstitusi yang merupakan tujuan dari Kanada. Diantara undang-undang konstitusi tersebut yaitu *The Canadian Human Rights Act of 1977 (Women Right)* dan *The Canadian Human Rights Act of 1977 (Women Right)*.

Sejarah Kanada telah dibentuk oleh banyak wanita yang bekerja keras untuk mempromosikan dan menegakkan kesetaraan gender di Kanada. Wanita memperjuangkan sejumlah hak asasi manusia penting yang telah menjadi nilai-nilai inti Kanada - hak untuk memilih dalam pemilihan provinsi dan federal, hak untuk memiliki properti, hak untuk mendapatkan upah yang adil, dan akhirnya, hak untuk diakui sebagai "orang" dibawah hukum. Perempuan sekarang dilindungi dari diskriminasi dengan alasan gender, usia, status perkawinan dan banyak lagi oleh *Canadian Human Rights*

Act dan Canadian Charter of Rights and Freedoms.(Canada, 2017) Hak-hak perempuan adalah hak asasi manusia.Hak-hak kesetaraan sangat penting, mengingat perlakuan yang tidak setara yang dialami perempuan di Kanada.Sejumlah instrumen hukum ada di Kanada untuk melindungi kesetaraan bagi perempuan.

Salah satunya adalah *Canadian Charter of Rights and Freedoms*, yang memberikan perlindungan konstitusional terhadap hak-hak asasi individu.Ini berlaku untuk hubungan antara individu dan pemerintah, sementara hubungan antara individu dicakup dalam bidang-bidang tertentu oleh *Canadian Human Rights Act (CHRA)*, serta undang-undang hak asasi manusia provinsi dan teritorial. Ada dua bagian utama dari Piagam yang perlu diperhatikan sehubungan dengan kesetaraan: bagian 15 dan 28. (Canada, 2017)

Bagian 15 memastikan perlindungan dan manfaat hukum yang sama"*tanpa diskriminasi [...] berdasarkan ras, asal-usul kebangsaan atau etnis, warna kulit, agama, jenis kelamin, usia atau cacat mental atau fisik.*"

Keputusan pengadilan telah memperluas daftar ini untuk melarang diskriminasi dengan alasan lain, seperti kewarganegaraan, status perkawinan dan orientasi seksual; keputusan juga telah mengakui bahwa banyak alasan diskriminasi dapat bersinggungan dalam

kasus-kasus tertentu. Bagian 28 menjamin bahwa semua hak yang dicakup dalam Piagam berlaku sama untuk pria dan wanita.

The Canadian Human Rights Act of 1977 menyatakan bahwa semua warga Kanada memiliki hak atas kesetaraan, kesempatan yang sama, perlakuan yang adil, dan lingkungan yang bebas dari diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, orientasi seksual, status perkawinan dan status keluarga. Ini melindungi warga Kanada dari diskriminasi ketika mereka dipekerjakan oleh atau menerima layanan dari: (1) Pemerintah federal; (2) Pemerintah negara-negara pertama; atau (3) Perusahaan swasta yang diatur oleh pemerintah federal seperti bank, perusahaan angkutan truk, perusahaan penyiaran dan perusahaan telekomunikasi.

CHRA membentuk *Canadian Human Rights Commission* untuk menyelidiki dan menyelesaikan pengaduan diskriminasi, dan merujuknya ke *Canadian Human Rights Tribunal* untuk suatu keputusan atau penyelesaian.Undang-undang legislatif lainnya yang penting bagi perempuan dan hak kesetaraan adalah *Employment Equity Act and the Public Sector Equitable Compensation Act.*(Canada, 2017)

Dengan adanya undang-undang konstitusi diatas mendorong setiap

kebijakan Kanada baik untuk dalam maupun luar negeri harus melindungi hak-hak perempuan dan mendorong adanya kesetaraan gender. Sebuah undang-undang konstitusi sebuah Negara merupakan prinsip-prinsip dasar dan hukum suatu negara yang menentukan kekuasaan dan tugas pemerintah akan menjamin hak-hak tertentu untuk orang-orang di dalamnya.

b. Society

Feminisme dapat diartikan sebagai gerakan politik yang minat utamanya adalah hak-hak perempuan dan emansipasi gender. Feminisme adalah pendekatan akademis yang melihat melalui lensa gender untuk memahami lebih jauh tidak hanya tentang perempuan dan gender tetapi juga bagaimana perempuan dan gender mampu menolong Kanada untuk mempelajari lebih luas tentang dunia secara umum.

Feminisme dalam bahasa sederhana adalah “tidak hanya menyangkut persoalan perempuan ataupun sekadar menambahkan perempuan kedalam konstruksi laki-laki (male construction), melainkan menyangkut pandangan terhadap politik global dalam melihat isu gender dan perempuan dan bagaimana hal ini menunjukkan bagaimana dunia mengupayakannya “. (Narain, 2014) Didalam feminisme, ada banyak

aliran pemikiran yang berkembang dan mempunyai jawaban yang berbeda mengenai politik dan politik internasional; namun, perbedaan tersebut harus dilihat sebagai satu lautan dengan banyak gelombang dan bukan sebagai sungai-sungai yang mengalir ke banyak arah. (Soetjipto & dkk, Gender dan Hubungan Internasional Sebuah Pengantar, 2013)

Dalam pengambilan keputusan mengenai bantuan pembangunan berbasis kesetaraan gender oleh Kanada dipengaruhi oleh keadaan social yang dipengaruhi oleh pemikiran feminisme sehingga munculah feminist politicians dan femocrat. Pemikiran dan nilai-nilai yang dimiliki mempengaruhi setiap kebijakan yang akan dibuat.

Nilai-nilai itu termasuk feminisme dan pemajuan hak-hak perempuan dan anak perempuan. Penting - dan bersejarah - bahwa Kanada memiliki perdana menteri dan pemerintah yang bangga menyatakan diri sebagai feminis. Hak-hak perempuan adalah hak asasi manusia. Hak-hak ini merupakan inti dari kebijakan luar negeri Kanada.

Minister of International Development and La Francophonie meluncurkan Feminist International Assistance Policy pertama Kanada, yang menargetkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan. Kanada memosisikan Kanada di garis depan

upaya global ini. Ini adalah masalah keadilan dasar dan juga ekonomi dasar. Kanada tahu bahwa memberdayakan perempuan, di luar negeri dan di Kanada, membuat keluarga dan negara lebih sejahtera.

Kanada berkomitmen untuk semua ini karena solidaritas internasional adalah nilai Kanada bersama. Di dunia yang semakin saling terhubung maka dari itu bantuan internasional Kanada tidak hanya akan menguntungkan komunitas mitra tetapi juga warga Kanada. Bersama dengan mitra dan sekutu internasional Kanada, Kanada memiliki tanggung jawab kolektif untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan dan keamanan global, pendidikan, perlindungan lingkungan dan pertumbuhan yang bekerja untuk semua orang — dan Kanada akan melakukannya dengan keyakinan dan kebanggaan.

Pada tahun 1970-an dan sesudahnya, sejumlah kelompok yang berdedikasi pada alasan memilih lebih banyak perempuan untuk jabatan publik tiba di tempat kejadian di Kanada: Women for Political Action, Feminist Party of Canada, Winning Women, Solusi 52%, Komite untuk 94, dan Equal Voice. Kebangkitan tentang memperjuangkan hak perempuan bangkit dari aktivisme gerakan perempuan di sekitar perwakilan perempuan di tingkat nasional di Kanada. Pada United Nations World Conference on Women tahun 1995

tentang Perempuan, Kanada berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah untuk memastikan kesetaraan akses perempuan dan penuh partisipasi dalam struktur kekuasaan dan pengambilan keputusan, serta meningkatkan kapasitas perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan. Kanada berbagi beberapa karakteristik politik dengan AS, seperti sistem pemilihan FPTP. Kanada mengandalkan pekerjaan banyak kelompok perempuan mengkhuskan diri dalam promosi perempuan dalam politik, tetapi belum pernah ada kampanye nasional atau tuntutan kuota gender yang sah atau kursi yang dipesan. Memang, tidak semua pihak memandang representasi perempuan sebagai masalah kepedulian demokratis.

Peran politisi perempuan dan pengaruh feminisme di Kanada memberikan hasil yang baik bagi kemajuan partisipasi perempuan di Kanada, dengan adanya perwakilan perempuan di Parlemen aspirasi perempuan tersampaikan.

Wanita pertama yang terpilih ke House of Commons of Canada adalah Agnes Macphail, dalam pemilihan 1921. Meskipun perwakilan perempuan dalam politik telah meningkat sejak itu, dan partai-partai politik telah mengidentifikasi peningkatan jumlah kandidat perempuan sebagai tujuan organisasi dan politik, perempuan masih

secara signifikan kurang terwakili dalam politik dibandingkan dengan populasi umum. Kanada memiliki seorang wanita Perdana Menteri, Kim Campbell. (CBC, 2018)

Partai-partai politik kadang-kadang mencapai perwakilan seimbang dalam kaukus terpilih mereka, tetapi terutama sebagai produk sampingan dari keruntuhan partai - misalnya, dalam pemilu 1993, Konservatif Progresif mencapai kesetaraan gender dalam kaukus terpilih mereka, tetapi hanya berdasarkan pemilihan dua anggota saja. Parlemen nasional dan kehilangan status partai resmi. Pada berbagai kesempatan, partai-partai juga memiliki 100 persen perwakilan perempuan di kaukus mereka, tetapi sekali lagi hanya karena memiliki kaukus yang hanya terdiri dari satu atau dua anggota. Partai Demokrasi Baru Yukon memperoleh perbedaan, dalam pemilihan umum Yukon 2011, untuk menjadi partai pertama dengan status partai resmi yang pernah memiliki kaukus terpilih yang mencapai atau melampaui paritas antara perempuan dan laki-laki, dengan empat perempuan dan dua laki-laki terpilih sebagai MLA. Partai Demokrasi Baru Alberta mencapai perbedaan, dalam pemilihan umum Alberta 2015, dari yang paling dekat bahwa kaukus partai yang memerintah pernah mencapai keseimbangan gender - kaukus partai

memiliki 25 wanita dan 28 pria, mewakili kaukus yang 47 persen perempuan. (Bennett, 2015)

Pemerintah konsensus non-partisan Wilayah Barat Laut mencapai hampir paritas gender di seluruh badan legislatif dalam pemilihan umum Wilayah 2019, dengan sembilan perempuan dan 10 laki-laki terpilih sebagai MLA (Member of Legislative Assembly); pada pertemuan formal pertama dewan legislatif, MLA memilih seorang wanita, Caroline Cochrane, sebagai perdana menteri, dan memilih wanita untuk empat dari enam peran kabinet. (Williams, 2019)

Pada 2010, Kanada menduduki peringkat ke-50 di dunia untuk partisipasi perempuan dalam politik, dengan perempuan hanya memegang 23 persen kursi di badan legislatif federal, provinsi, dan teritorial. Di tingkat federal, Kanada diikat dengan Mauritania untuk tempat ke-49. Perdana Menteri Justin Trudeau menunjuk kabinet barunya didasarkan pada kesetaraan gender, sama seperti ketika ia membentuk pemerintahan pertamanya pada tahun 2015. Perempuan berada dalam minoritas di House of Commons dan semua kamar legislatif provinsi dan teritorial. Untuk mengimbangi ini, pengangkatan anggota terdiri dari wanita sebanyak pria telah menyebar. Meski bukan fenomena baru di

Kanada, paritas ini masih merupakan fenomena yang pertama kali.

Jean Charest pada 2007 yang pada saat itu menjabat sebagai perdana menteri Quebec, ia menunjuk kabinet pertama negara itu dengan paritas gender. Rachel Notley, perdana menteri terpilih Alberta pada 2015, melakukan hal yang sama ketika dia berkuasa, seperti halnya John Horgan di British Columbia pada 2017 dan François Legault di Quebec satu tahun kemudian. Di kancah federal, penunjukan kabinet pertama yang terdiri dari jumlah perempuan dan laki-laki yang sama oleh Trudeau pada tahun 2015 telah menerima banyak perhatian. Kanada dibawah pemerintahan Justin Trudeau berusaha untuk lebih memahami berbagai pandangan yang diungkapkan di media ketika kabinet dengan kesetaraan gender diumumkan. Liputan media umumnya baik, tetapi juga menunjukkan sejumlah kekhawatiran tentang langkah-langkah untuk mendukung akses yang lebih baik bagi perempuan di bidang politik. (Rouillard & Lalancette, 2019)

Fenomena yang terjadi ini membuat tentang bahasan komposisi paritas kabinet menyoroti aspek historis dari pengumuman atau menyajikannya sebagai cerminan masyarakat dan era di mana inklusi dan kesetaraan adalah nilai-nilai penting. Harapan melihat standar baru yang ditetapkan setelah pengumuman

Charest pada 2007 tentang kabinet yang seimbang gender juga sangat hadir: Paritas gender adalah suatu prestasi, yang pertama di Amerika Utara, yang akan memberi tekanan pada pemerintah Kanada lainnya, pemerintah federal di khususnya.

Strategi persuasif yang berbeda digunakan untuk menyajikan kesetaraan gender dan langkah-langkah implementasinya sebagai bermanfaat bagi masyarakat: penggunaan statistik pada jumlah perempuan yang dipilih, contoh-contoh strategi yang diterapkan di panggung dunia, atau dampak dari sejumlah besar perempuan pada pengambilan keputusan.

Pada November 4, 2015, Justin Trudeau, Perdana Menteri Kanada yang baru terpilih, menunjuk 15 wanita untuk duduk di kabinet 30. 'Kabinet paritas' baru Trudeau adalah sebuah revolusi di Kanada karena mengakhiri kebiasaan lama penamaan laki-laki untuk sebagian besar posisi pemerintah bahwa negara itu berbagi dengan berbahasa Inggris lainnya seperti Amerika Serikat dan Inggris. Tidak seperti negara-negara Eropa seperti Prancis dan Italia, Kanada memiliki reputasi negatif dalam hal keterwakilan perempuan dalam pemerintahan. Faktanya, Kanada berada di peringkat ke-50 dari 190 negara di peringkat negara-negara Inter-parlemen 2014 terkait dengan partisipasi politik perempuan. Selama kampanyenya,

Trudeau menampilkan dirinya sebagai juara kesetaraan gender ketika ia berjanji pada kabinet 50-50. Dia bahkan menyatakan sebelum pemilihannya bahwa dirinya adalah seorang feminis dan bangga menjadi salah satunya. (Kassenaar & Wingrove, 2015)

Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau merupakan seorang feminis. Trudeau mengatakan ayahnya, mantan Perdana Menteri Pierre Trudeau, mengajarnya pentingnya membela hak-hak orang lain. Tetapi dia memuji ibu dan istrinya dengan membentuknya menjadi seorang feminis seperti sekarang ini. Baginya, karena seorang feminis adalah seseorang yang percaya bahwa pria dan wanita harus setara, dan yang percaya bahwa ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk sampai ke sana. Maka dari itu untuk mencapai apa yang dia percayai mengenai adanya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki menjadikan setiap kebijakan dibawah pemerintahannya berbasis kesetaraan gender. (Carpenter, 2018)

Trudeau memosisikan dirinya sebagai kebalikan dari mantan perdana menteri Konservatif Stephen Harper, yang pemerintahannya hampir sepuluh tahun termasuk menghapus kata "kesetaraan" dari mandat Status of Women Canada (WAGE) dan memangkas anggarannya sebesar 37 persen. Pada 2015, Kanada telah turun ke peringkat 25 pada indeks

ketidaksetaraan Gender PBB, turun dari posisi pertama pada 1995. Masalah ke Trudeau, yang feminismenya begitu terbuka sehingga menarik perhatian baik pro dan kontra di masyarakat. Kanada telah naik kembali ke peringkat ke-12 berdasarkan indeks PBB, yang mengevaluasi negara berdasarkan indikator seperti kesehatan reproduksi, tingkat pendidikan dan jumlah perempuan dalam pemerintahan. (Gerster, 2019)

Perdana Menteri Trudeau, seorang feminis yang memproklamirkan diri, telah memodelkan perwakilan dengan menunjuk seorang menteri luar negeri perempuan, seorang menteri pembangunan perempuan dan kabinet paling beragam dalam sejarah Kanada. Kebijakan Kanada tidak, bagaimanapun, berjanji untuk "menggangu" struktur kekuasaan patriarki dalam bantuannya, seperti yang dilakukan Swedia, meskipun itu memasukkan partisipasi politik perempuan sebagai bidang prioritas tematis. Untuk sebagian besar, pendekatan Kanada memprioritaskan kesetaraan gender sebagai prioritas utama dalam melayani tujuan ekonomi dan keamanan yang lebih luas. Menurut Pemerintah Kanada, kebijakan mereka "berupaya memberantas kemiskinan dan membangun dunia yang lebih damai, lebih inklusif, dan lebih sejahtera. Kanada sangat percaya bahwa mempromosikan kesetaraan gender dan

memberdayakan perempuan dan anak perempuan adalah pendekatan yang paling efektif untuk mencapai tujuan ini”

Menteri Luar Negeri Kanada saat ini yakni Chrystia Freeland merupakan salah satu menteri perempuan di Kanada. Sebelumnya setelah pemilihan 2015, Chrystia Freeland diangkat ke Kabinet sebagai Menteri Perdagangan Internasional. Sekitar waktu yang sama, ia dinobatkan sebagai salah satu dari 50 orang paling berpengaruh di Toronto oleh Toronto Life. Freeland, mantan jurnalis multibahasa yang bintangnya telah meningkat di Partai Liberal sejak pemilihannya sebagai anggota parlemen pada tahun 2013, sekarang adalah wanita ketiga yang memegang jabatan tersebut - dan Liberal wanita pertama yang melakukannya. Menurut Chrystia Freeland, wanita adalah agen kuat untuk perubahan dan perdamaian sehingga dengan adanya pemberdayaan perempuan akan meningkatkan perekonomian Negara. Freeland dan Trudeau adalah ekstrovert dan politisi alamiah yang memiliki pandangan serupa terhadap peran perempuan dalam pembangunan negara. (Diebel, 2015)

Chrystia Freeland merupakan seorang feminis. Pengalamannya dimilikinya memberikan efek yang sangat besar pada dirinya. Dari ibunya, Halyna, seorang feminis dan aktivis yang menggunakan

hukum untuk memperjuangkan keadilan sosial, Freeland belajar betapa kuatnya perempuan. Hal tersebutlah yang menjadikannya seorang feminis. Freeland meneruskan perjuangan ibunya, Halyna. Dia sering mengutip ikon feminis Emma Goldman ke Chrystia, dan baris favoritnya adalah: *“If I can’t dance, I don’t want to be part of your revolution.”* (Diebel, 2015)

Kanada berkomitmen untuk memberikan bantuan internasional feminis yaitu: (1) Berbasis hak asasi manusia dan inklusif. Semua orang harus menikmati hak asasi manusia yang sama, tanpa memandang jenis kelamin, ras, suku, asal kebangsaan atau etnis, warna kulit, agama, bahasa, orientasi seksual, identitas gender, usia, kemampuan atau aspek identitas lainnya; (2) Strategis dan fokus. Bantuan akan diarahkan pada inisiatif-inisiatif yang paling mendukung pemberdayaan perempuan dan anak perempuan dan memiliki potensi terbesar untuk mengurangi ketidaksetaraan gender; (3) Transformatif dan aktivis. Hubungan kekuasaan yang tidak merata dan diskriminasi sistemik, serta norma-norma dan praktik-praktik berbahaya, akan ditantang, dan berbagai pemangku kepentingan — termasuk laki-laki dan laki-laki — akan dilibatkan; serta (4) Berbasis bukti dan akuntabel. Bantuan Kanada akan diinformasikan oleh analisis berbasis gender dan akan mengandalkan

akuntabilitas yang jelas untuk perencanaan, pencapaian, pelacakan, dan pelaporan hasil kesetaraan gender.

Tiga dekade terakhir telah melihat pengurangan dramatis dalam kemiskinan global, tetapi tidak semua orang mendapat manfaat yang sama. Ratusan juta orang, terutama perempuan dan anak perempuan, masih miskin, memiliki akses yang tidak merata ke sumber daya dan peluang, dan menghadapi risiko besar konflik kekerasan, iklim dan bahaya lingkungan, dan / atau ketidakamanan ekonomi dan politik. Dengan menghilangkan hambatan terhadap kesetaraan dan membantu menciptakan peluang yang lebih baik, perempuan dan anak perempuan dapat menjadi agen perubahan yang kuat dan meningkatkan kehidupan mereka sendiri dan keluarga mereka, masyarakat dan negara. Ini adalah cara ampuh untuk mengurangi kemiskinan bagi semua orang. Kanada adalah bagian dari komunitas global. Inilah sebabnya Kanada berinvestasi dalam bantuan internasional: membantu mengurangi kemiskinan dan kerentanan di seluruh dunia meningkatkan keamanan dan kemakmuran Kanada sendiri.

Kebijakan Bantuan Internasional Feminis Kanada mengakui bahwa mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan adalah cara terbaik untuk

membangun dunia yang lebih damai, lebih inklusif, dan lebih sejahtera. Untuk melakukan ini, ia mendukung investasi yang ditargetkan, kemitraan, inovasi dan upaya advokasi dengan potensi terbesar untuk menutup kesenjangan gender dan meningkatkan peluang semua orang untuk sukses. Tetapi ia juga bekerja lintas bidang tindakan lain yang mencerminkan sifat kemiskinan multidimensi, dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Bekerja dengan cara ini menghasilkan hasil pengembangan yang lebih baik dan bermanfaat bagi semua orang, termasuk pria dan anak lelaki.

Bantuan internasional feminis Kanada akan membantu melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia dari semua kelompok rentan dan terpinggirkan dan meningkatkan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan yang setara. Ini akan membantu perempuan dan anak perempuan mencapai akses yang lebih adil dan kontrol atas sumber daya yang mereka butuhkan untuk mengamankan kesetaraan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Berkomitmen pada pendekatan feminis untuk bantuan internasional merupakan perubahan signifikan dalam cara kita bekerja. Pendekatan feminis lebih dari berfokus pada perempuan dan anak perempuan; melainkan, ini adalah cara paling efektif untuk mengatasi akar penyebab kemiskinan.

c. *Human environment*

Budaya Kanada yang mengakui bahwa perempuan dan laki-laki harus memiliki komitmen yang sama terhadap perubahan sikap, perilaku dan peran yang mendukung kesetaraan gender.

Semua pemikir, penulis dan pengkaji politik internasional lewat perspektif feminis menempatkan gender sebagai pusat dari keseluruhan analisis yang dilakukan. Dengan demikian, menjadi penting dan wajib untuk memulainya dari definisi dan konsep tentang gender. Gender juga memuat hal-hal mengenai harapan masyarakat akan nilai apa yang dianggap baik dan buruk serta harapan akan peran yang dapat dimainkan oleh perempuan dan laki-laki di masyarakat. (Azizah, 2017) Pemikir feminis mengkaji lebih jauh konsep dasar tersebut, lebih hanya sekadar soal seks atau gender; namun juga mempertanyakan secara kritis apa yang dianggap atau dipahami sebagai sesuatu yang esensial dan universal tersebut.

Dalam pandangan Kanada sendiri dalam memandang pengarusutamaan gender yakni strategi untuk menilai implikasi bagi laki-laki dan perempuan, dari setiap tindakan, kebijakan atau program yang direncanakan di semua bidang dan di semua tingkatan. Pendekatan ini mengakui perlunya memperhitungkan perbedaan sosial dan

ekonomi antara laki-laki dan perempuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang diusulkan telah menghasilkan hasil yang adil bagi perempuan dan laki-laki. (Government of Canada, 2017) Kanada telah berada di garis depan dalam mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan selama beberapa dekade, baik di dalam negeri maupun lewat bantuan pembangunan di luar negeri. Dalam proyek yang dilakukan oleh Kanada dan Indonesia dalam *Canada- Indonesia Trade and Private Sector Assistance* bertujuan untuk berkontribusi pada lingkungan pendukung ekspor yang lebih baik bagi UKM Indonesia yang dipimpin perempuan. TPSA dirancang untuk menyediakan pelatihan, penelitian dan bantuan teknis bagi instansi pemerintah Indonesia, sektor swasta—khususnya usaha kecil dan menengah (UKM)—akademisi, dan organisasi masyarakat madani untuk informasi terkait perdagangan, analisis kebijakan perdagangan, reformasi regulasi dan promosi dagang dan investasi oleh Kanada, Indonesia dan tenaga ahli dari organisasi pemerintah maupun swasta.

Ada semakin banyak bukti bahwa memajukan kewirausahaan perempuan membawa keuntungan bagi perekonomian maupun masyarakat. Namun di Indonesia dan Kanada, perempuan kurang terwakili

di usaha kecil dan menengah (UKM) serta start-up (perusahaan rintisan), akibat terhambat sejumlah tantangan internal dan eksternal yang tidak hanya menghalangi pertumbuhan bisnis mereka, tapi juga kerap menempatkan perempuan pada posisi dirugikan dibanding rekan-rekan mereka yang laki-laki. Manfaat kewirausahaan perempuan di Indonesia dan Kanada tak akan sepenuhnya terwujud tanpa upaya mengatasi hambatan ini.

Oleh karena itu, dalam merealisasikan peran penting potensial perempuan ini, pada kenyataannya, pemerintah Indonesia telah berusaha sejak akhir krisis keuangan Asia untuk mendorong pengembangan kewirausahaan perempuan dengan mendukung pengembangan UMK melalui berbagai program karena usaha-usaha ini dianggap penting. Jalan untuk pengujian dan pengembangan kemampuan wirausaha perempuan. Program-program tersebut meliputi pelatihan kejuruan, bantuan teknis, pinjaman mikro dari bank dan lembaga keuangan formal lainnya, dan dukungan (dalam keuangan, teknis, pemasaran dan penyediaan bahan baku) yang disediakan oleh perusahaan milik negara melalui program kemitraan. Banyak dari program ini diimplementasikan dalam kolaborasi dengan pemerintah asing seperti Australia, Kanada, organisasi PBB (UN Women) dan organisasi non-pemerintah internasional

seperti Asia Foundation. Selain itu, pada tahun 2007 pemerintah meluncurkan skema jaminan kredit publik (dikenal sebagai Kredit Bisnis Komunitas atau KUR) yang menargetkan terutama UMK, karena sebagian besar perusahaan kecil ini, terutama di sektor perdagangan, dimiliki atau dikelola oleh perempuan. (Tambunan, Women Entrepreneurs in MSEs in Indonesia: Their Motivations and Main Constraints, 2017) Baik pemerintah Kanada maupun pemerintah Indonesia berkomitmen pada konvensi serta agenda internasional yang mengukuhkan hak-hak perempuan untuk bekerja, memiliki properti, serta menjalankan bisnis dalam kondisi kesetaraan penuh dan bebas dari diskriminasi.

Dalam tujuan pengarusutamaan gender, TPSA melakukan berbagai penelitian untuk mencoba menjawab permasalahan apa yang terjadi dan bagaimana untuk mengatasi hal tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh TPSA akan melihat peran gender dalam UKM siap-mengekspor atau pengekspor dan perbedaan berbasis gender dalam akses terhadap sumber daya, pengambilan keputusan, dan pengendalian manfaat dalam kaitannya dengan bisnis terutama dari analisis kualitatif.

1. Social structure and behaviours

a. Major common value orientation

Masyarakat Kanada dikenal sebagai masyarakat yang sopan, bijaksana, dan cinta damai. Masyarakatnya sangat menghargai toleransi, kerendahan hati, dan tanpa kekerasan. Masyarakat Kanada memiliki sifat dan kebiasaan masing-masing. Beberapa bahkan berani mengatakan bahwa sifat bervariasi dari satu provinsi ke provinsi berikutnya. (Live&Learn, 2016)

Nilai egalitarianism dalam masyarakat Kanada menganggap semua orang setara. Inilah sebabnya mengapa hierarki tidak terlalu jelas. Setiap orang berhak atas persamaan hak dan peluang dalam masyarakat ini tanpa memandang jenis kelamin, usia, ras atau kepercayaan.

Kebenaran politik adalah menahan diri dari mengatakan atau melakukan hal-hal yang mengecualikan, menghina atau memarginalkan kelompok orang. Dan karena Kanada beragam dan multikultural, mengetahui bagaimana menjadi benar secara politis sangat penting untuk hidup harmonis dengan semua orang.

Nilai-nilai Kanada adalah nilai etika dan kemanusiaan Kanada yang umum dimiliki bersama. Partai-partai politik besar telah secara eksplisit mengklaim bahwa mereka menjunjung tinggi nilai-nilai ini, tetapi menggunakan generalisasi untuk

menentukannya. Justin Trudeau setelah menjabat sebagai Perdana Menteri pada tahun 2015 mencoba mendefinisikan apa artinya menjadi orang Kanada, mengatakan bahwa Kanada tidak memiliki identitas tertentu tetapi memiliki nilai bersama (Lawson, 2015):

“There is no core identity, no mainstream in Canada,” he claimed. “There are shared values — openness, respect, compassion, willingness to work hard, to be there for each other, to search for equality and justice. Those qualities are what make us the first postnational state.”

Beberapa percaya bahwa Elsie MacGill mendefinisikan nilai Kanada. Dia adalah pelopor wanita dalam bidang teknik dan bisnis, pahlawan perang dan panutan. Bagian 15 dari *Canadian Charter of Rights and Freedoms* melarang diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.

Canadian Charter of Rights and Freedoms, yang sangat dipromosikan oleh Perdana Menteri Pierre Trudeau, diadopsi pada tahun 1982. Piagam tersebut menjamin hak-hak politik tertentu bagi warga negara Kanada dan hak-hak sipil semua orang di Kanada dari kebijakan dan tindakan semua bidang dan tingkat pemerintahan. Ini dirancang untuk menyatukan orang Kanada di seKanadar seperangkat prinsip yang mewujudkan hak-hak itu. Bahkan sebelum ia memasuki

dunia politik, Trudeau telah mengembangkan konsep piagamnya terutama sebagai ekspresi dari nilai-nilai umum Kanada (Kernerman & Resnick, 2005). Trudeau mengatakan bahwa berkat Piagam, Kanada sendiri sekarang dapat didefinisikan:

“Canada is a society where all people are equal and where they share some fundamental values based upon freedom. The search for this Canadian identity, as much as my philosophical views, had led me to insist on the charter.”

Sejarah Kanada telah dibentuk oleh banyak wanita yang bekerja keras untuk mempromosikan dan menegakkan kesetaraan gender di Kanada. Wanita memperjuangkan sejumlah hak asasi manusia penting yang telah menjadi nilai-nilai inti Kanada - hak untuk memilih dalam pemilihan provinsi dan federal, hak untuk memiliki properti, hak untuk mendapatkan upah yang adil, dan akhirnya, hak untuk diakui sebagai “*persons*” dibawah hukum.

b. Major institutional pattern

Pola kelembagaan yang utama dalam pengambilan keputusan bantuan pembangunan Canada-Indonesia Trade and Private Sector Assistance yaitu dipengaruhi oleh lembaga *Global Affairs*

Canada dan *Department Women and Gender Equality Canada (WAGE)*.

Global Affairs Canada merupakan institusi di Kanada yang mengelola hubungan diplomatik Kanada, menyediakan layanan konsuler untuk warga Kanada, mempromosikan perdagangan internasional negara itu, dan memimpin pembangunan internasional Kanada dan bantuan kemanusiaan. Sedangkan *Department Women and Gender Equality Canada (WAGE)* bekerja untuk memajukan kesetaraan bagi perempuan dengan memfokuskan upayanya dalam tiga bidang prioritas: meningkatkan keamanan ekonomi dan kemakmuran perempuan; mendorong kepemimpinan perempuan dan partisipasi demokratis; dan mengakhiri kekerasan berbasis gender. Status Perempuan Kanada juga memainkan peran kepemimpinan dalam implementasi Analisis Plus Berbasis Gender (GBA+) berbasis pemerintah.

Kerangka kerja dibuat untuk menilai kemajuan penerapan Kebijakan Global Affairs Kanada tentang Kesetaraan Gender. Ini pada dasarnya memfokuskan pengukuran kinerja di mana Global Affairs Kanada telah memilih untuk fokus, dan mengidentifikasi apa hasil aktual yang akan diukur. Kesetaraan gender adalah area hasil utama dan tema pemrograman lintas sektoral, kerangka kerja dirancang untuk menilai kinerja institusi.

Pembaruan 1999 untuk Kebijakan Global Affairs Kanada tentang Kesetaraan Gender mencerminkan konsensus antara Global Affairs Kanada dan mitra pembangunannya (termasuk pemerintah mitra dan lembaga bantuan pembangunan lainnya) bahwa kesetaraan gender adalah tujuan pembangunan yang penting dalam haknya sendiri, dan juga merupakan bagian integral dari pencapaian pengurangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan. Kebijakan ini juga mencerminkan komitmen internasional Kanada terhadap kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, terutama Platform untuk Aksi 1995 yang disahkan di Beijing (dan ditegaskan kembali pada 2005) dan CEDAW, di mana Kanada dan sebagian besar mitra pembangunan adalah penandatangan.

Berdasarkan Global Affairs Kanada tentang Kesetaraan Gender, hasil keseluruhan atau dampak yang ingin disumbangkan oleh Global Affairs Kanada adalah "kesetaraan antara perempuan dan laki-laki untuk memastikan pembangunan berkelanjutan." Kebijakan ini juga mengidentifikasi tiga tujuan institusi yang dapat disajikan kembali dalam bentuk hasil sebagai berikut; (1) Pengambilan keputusan. Partisipasi yang lebih setara antara perempuan dan laki-laki sebagai pengambil keputusan dalam membentuk pembangunan berkelanjutan di masyarakat

mereka; (2) Hak. Perempuan dan anak perempuan lebih mampu mewujudkan hak asasi mereka sepenuhnya; (3) Sumber daya dan manfaat pengembangan. Mengurangi ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam akses dan kontrol atas sumber daya dan manfaat pembangunan. (Canada, 2017)

Ini adalah hasil yang dapat disumbangkan oleh Global Affairs Kanada, tetapi tidak akan tercapai dengan sendirinya. Oleh karena itu kinerja Global Affairs Kanada perlu fokus pada sifat dan pentingnya kontribusi tambahan yang dibuat melalui investasi Global Affairs Kanada dalam inisiatif tertentu. Sementara hasil yang diharapkan dari kesetaraan gender telah diidentifikasi di tingkat institusi, hasil aktual dari Global Affairs Kanada dan kontribusinya terhadap kesetaraan gender tergantung pada keputusan yang dibuat dalam pemilihan, desain dan pengelolaan investasi tertentu. Investasi ini dapat dilakukan melalui salah satu dari tiga model bisnis Global Affairs Kanada (pemrograman langsung, pemrograman responsif, dan pendanaan inti / dukungan kelembagaan), merespons berbagai sektor prioritas (seperti tata kelola, sektor swasta, kesehatan, pendidikan) dan menggunakan berbagai pendekatan (dari pengembangan masyarakat hingga pengembangan kapasitas kelembagaan). Sebagian besar

investasi ini tidak memiliki kesetaraan gender sebagai tujuan utama mereka. Namun, sejauh mereka mempengaruhi orang, semua investasi ini berpotensi memiliki efek positif (atau negatif) pada kesetaraan gender.

Lembaga atau mitra Negara yang menerima pendanaan inti umumnya memiliki hubungan yang berkelanjutan dengan Global Affairs Kanada. Dengan pendanaan inti, Global Affairs Kanada bertujuan untuk mencapai hasil pembangunan secara tidak langsung melalui dukungan kepada mitra dengan kebijakan, prioritas dan pendekatan yang sesuai dengan yang ada. Global Affairs Kanada. Pelaporan kinerja oleh lembaga-lembaga ini berkaitan dengan penggunaan sumber daya mereka dari semua sumber dalam mendukung tujuan kebijakan kelembagaan. Untuk pendanaan inti berfokus pada kualitas strategi kelembagaan dan mekanisme untuk mencapai hasil pengembangan kesetaraan gender, dengan perhatian khusus pada pemantauan dan pelaporan hasil kesetaraan gender.

c. Major characteristics of social organizations

Karakter bersifat formal karena memiliki struktur, identitas, waktu diatur secara resmi, pengorganisasian, visi dan misi, tujuan yang jelas dalam

mencapai tujuan organisasi berdasarkan nilai dan norma yang dianut.

d. Role differentiation and specialization

Adanya kesetaraan gender untuk persamaan akses dan kesempatan perempuan dan laki-laki disegala bidang. Kanada dan masyarakatnya percaya bahwa dengan adanya kesetaraan gender akan meningkatkan dan memperbaiki suatu kondisi Negara. Perempuan memiliki peran yang besar untuk meningkatkan perekonomian dan dengan adanya pemberdayaan perempuan merupakan salah satu faktor dari suksesnya suatu pembangunan.

Melalui pengembangan internasional dan inisiatif perdamaian dan keamanan Kanada, masyarakat Kanada mendukung upaya internasional untuk meningkatkan peran perempuan dan anak perempuan. Diketahui bahwa sejak dahulu pergerakan masyarakat Kanada untuk memperjuangkan kesetaraan gender dengan mendukung hak-hak yang dimiliki oleh perempuan membuahkan hasil setelah upaya yang telah dilakukan dengan mengajukan tuntutan kepada Negara.

Nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat Kanada mengenai adanya kesetaraan hak untuk setiap orang membuat masyarakat Kanada peduli terhadap kondisi perempuan yang sering

kali mendapatkan diskriminasi dalam akses dan kesempatan yang dimiliki. Kedamaian dan kemakmuran adalah hak asasi setiap orang. Saat ini sebagai orang Kanada, Kanada memiliki peluang besar untuk membantu orang-orang di negara berkembang di dunia bergabung dengan kelas menengah global dan sistem multilateral yang mendukungnya.

Penting untuk mengingatkan diri Kanada sendiri mengapa Kanada melangkah — mengapa Kanada mencurahkan waktu dan sumber daya untuk kebijakan luar negeri, perdagangan, pertahanan, dan pembangunan: Warga Kanada lebih aman dan lebih makmur ketika lebih banyak dunia yang berbagi nilai-nilai Kanada.

Kesetaraan gender tidak dapat dicapai oleh perempuan dan anak perempuan secara terpisah. Pria dan anak laki-laki juga harus menentang tradisi dan adat istiadat yang mendukung dan mempertahankan ketidaksetaraan gender. Karena norma-norma sosial dan stereotip gender juga membatasi laki-laki dan anak laki-laki dalam peran sosial dan keluarga mereka, adalah penting bahwa laki-laki dan anak laki-laki dilibatkan dalam perjuangan untuk kesetaraan gender yang lebih besar, diberi kesempatan

untuk mengadvokasi kesetaraan gender, dan didorong untuk memimpin dengan memberi contoh dalam menghormati dan mempromosikan kepentingan perempuan dan anak perempuan. (Canada, 2019)

Sangat penting untuk mengubah sikap anak laki-laki remaja, karena konstruksi gender dibentuk selama masa remaja. Terlibat dengan remaja laki-laki memberikan peluang terbaik untuk mempromosikan norma-norma gender positif dan mencegah berlanjutnya stereotip negatif sepanjang hidup mereka.

e. Groups: kinds and functions

Kelompok-kelompok yang menyebarkan nilai dan norma mengenai gender equality merupakan mayoritas berbentuk kelompok formal. Kelompok tersebut memiliki visi misi yang jelas dan terstruktur. Untuk menyebarkan kesadaran *gender equality* dan memperjuangkan hak-hak perempuan.

Selama beberapa dekade, perempuan di seluruh dunia telah memimpin perjuangan untuk kesetaraan gender. Organisasi perempuan lokal yang memajukan hak-hak perempuan, khususnya di tingkat paling dasar, memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran sosial dan

memobilisasi masyarakat untuk mengubah undang-undang, sikap, norma dan praktik sosial.

Untuk memperkuat suara perempuan di seluruh dunia, Kanada akan berkolaborasi dengan mitra untuk menguji coba, merancang, dan memperjuangkan cara-cara baru dan inovatif untuk bekerja dengan organisasi perempuan setempat yang memajukan hak-hak perempuan. (Canada, 2019)

f. Relevant social process (opinion formation, adult socialization, political)

Women Movement di Kanada yang menyuarakan mengenai hak-hak perempuan seperti hak memilih dan dipilih sehingga perempuan dapat menyampaikan aspirasinya untuk mempengaruhi kebijakan Negara.

Salah satu langkah awal menuju kesetaraan bagi wanita Kanada adalah legalisasi hak properti wanita yang sudah menikah. Dimulai di Ontario pada tahun 1884 dan Manitoba pada tahun 1900, *Married Women's Property Act* memberi perempuan yang menikah di provinsi-provinsi ini hak hukum yang sama dengan laki-laki, yang memungkinkan perempuan untuk dapat masuk ke dalam perjanjian hukum dan

membeli properti. Sisa provinsi dan teritori mengikuti dengan lambat, dengan Quebec akhirnya menandatangani *Married Women's Property Act* pada tahun 1964; *Civil Code of Québec* diamandemen untuk memberi perempuan yang menikah hak hukum dan hak milik penuh.

Tonggak penting lainnya untuk hak-hak perempuan adalah mendefinisikan "orang" di bawah *British North America Act*, 1867. Lima Terkenal, Henrietta Muir Edwards, Nellie McClung, Louise McKinney, Emily Murphy dan Irene Parlby, mengajukan petisi kepada pemerintah pada tahun 1928 untuk meminta Mahkamah Agung Kanada untuk memutuskan apakah "orang" dalam Undang-undang termasuk perempuan. Mahkamah Agung memutuskan bahwa itu tidak, karena alasan berikut: (1) *British North America Act* pada tahun 1928 harus mempertahankan makna "orang" akan diberikan oleh pengadilan ketika disahkan pada tahun 1867; (2) Menurut hukum umum, perempuan tidak bisa memegang jabatan politik; (3) Jika Parlemen Inggris bermaksud agar perempuan dimasukkan sebagai "orang-orang yang memenuhi syarat" di bawah pasal 24 Undang-Undang, itu akan mengatakan demikian.

Namun, banding ke Dewan Penasihat diluncurkan. Pada tahun 1929, Dewan memutuskan kata "orang" itu sendiri tidak jelas, dan akan lebih dipahami jika *British North America Act* diberi interpretasi yang lebih luas. Oleh karena itu, jika undang-undang itu mengecualikan perempuan secara khusus, itu seharusnya dinyatakan dengan jelas dalam UU. Sejak saat itu kemudian perempuan dianggap "orang" di bawah hukum. Hanya satu tahun kemudian, pada tahun 1930, Cairine Reay Wilson menjadi wanita pertama yang ditunjuk untuk menjadi Senat.

Pada awal abad ke-20, perempuan tidak diberi hak untuk memilih dalam pemilihan provinsi dan federal. Ini mulai berubah pada tahun 1916 ketika perempuan memenangkan hak untuk memilih dalam pemilihan provinsi di Manitoba, Saskatchewan dan Alberta. British Columbia dan Ontario memberi perempuan hak untuk memilih pada tahun 1917. Pada tahun yang sama, Kanada meloloskan *War-time Elections Act*, yang memberi perempuan di militer dan mereka yang memiliki saudara lelaki yang berperang dalam Perang Dunia I hak untuk memilih. Pada 1918, semua wanita Kaukasia memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan federal. Pada titik ini, masih banyak provinsi di mana

perempuan tidak diizinkan untuk memilih dalam pemilihan provinsi. Selain itu, banyak kelompok minoritas ditolak haknya untuk memilih. Provinsi terakhir yang memperpanjang hak untuk memilih dalam pemilihan provinsi untuk perempuan adalah Quebec, pada tahun 1940. Wilayah Barat Laut adalah wilayah terakhir, yang memberi perempuan hak untuk memilih pada tahun 1951. Mulai tahun 1947, hak untuk memilih diperluas ke beberapa minoritas kelompok, dan pada tahun 1960, semua warga Kanada diberikan hak untuk memilih, termasuk pria dan wanita Aborigin. (Canada, 2017)

Salah satu langkah besar pertama menuju kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam angkatan kerja adalah *Fair Employment Practices Act* dan *Female Employees Fair Remuneration Act* di Ontario, pada tahun 1951. *Female Employees Fair Remuneration Act* bertujuan untuk menghapus diskriminasi dengan menerapkan denda dan menciptakan sistem pengaduan. *Female Employees Fair Remuneration Act* dirancang untuk memberi perempuan upah yang sama untuk pekerjaan dengan nilai yang sama. Provinsi dan wilayah Kanada lainnya dengan cepat mengikuti jejak Ontario dalam mengadopsi tindakan

provinsi serupa untuk memastikan kesetaraan dalam angkatan kerja.

Ini juga menyebabkan pemerintah federal meloloskan tiga tindakan berikut: (1) *Canada Fair Employment Practices Act* tahun 1953, yang diterapkan pada layanan sipil; (2) *Female Employees Equal Pay Act* tahun 1956, yang membuat diskriminasi upah berdasarkan jenis kelamin terhadap hukum; dan (3) *Employment Equity Act* tahun 1986, yang berlaku untuk karyawan yang diatur oleh pemerintah federal dan mengharuskan pengusaha untuk mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan yang tidak perlu yang membatasi peluang kerja. (Canada, 2017)

Setelah adanya pergerakan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan mendorong Negara dan masyarakat Kanada peduli dengan adanya kesetaraan gender. Seiring dengan berjalannya waktu nilai-nilai tersebut tertanam kepada masyarakat Kanada sehingga sadar akan pentingnya kesetaraan gender. Pergerakan wanita yang telah berhasil tersebut memberikan sebuah motivasi kepada masyarakat lainnya sehingga semakin banyaknya pergerakan wanita yang ada saat ini di Kanada.

Dengan adanya hasil pergerakan yang berhasil mendorong pemerintah Kanada untuk mengeluarkan undang-undang mengenai hak memilih dan dipilih bagi perempuan membuat kepentingan perempuan di parlemen terwakilkan. Adanya perwakilan perempuan di pemerintah akan memberikan dampak yang baik bagi masa depan perempuan di sebuah Negara karena aspirasi perempuan akan semakin didengar.

Faktor Eksternal

Pengaturan eksternal pengambilan keputusan adalah kondisi di luar Kanada, yang berdasarkan pada topik tesis ini, adalah masalah gender di Indonesia. Berdasarkan perbedaan peran, di Indonesia, peran perempuan selalu menjadi ibu rumah tangga sedangkan peran laki-laki adalah pencari nafkah. Meskipun dalam kerangka hukum Indonesia bersifat netral gender, namun apabila hambatan yang dirasakan oleh perempuan dianalisis menggugurkan basis gender maka akan terlihat jika perempuan mengalami adanya diskriminasi. Di Indonesia, wirausaha perempuan memiliki peran ganda yakni mengurus pekerjaan rumah tangga dan usaha yang dimiliki. Saat ini masih dijumpai bahwa perempuan sering dikeluarkan dari program

pembangunan, sedangkan populasi di Indonesia didominasi oleh perempuan. Jika perempuan pengusaha ini diberdayakan dengan baik dengan memberikan akses informasi dan pengetahuan mengenai pasar akan mendorong kemajuan ekonomi masyarakat. Apabila perempuan tidak dapat memperbaiki kondisi ekonomi mereka karena mereka harus bergantung pada suami mereka maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami kemunduran. Jika situasi ini terus terjadi, beberapa perempuan di Indonesia akan menghadapi masalah dalam usahanya yang dapat mengakibatkan kebangkrutan.

Terkait dengan masalah ini, konsep kesetaraan gender mengidentifikasi bahwa setiap manusia baik perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam proses mengembangkan diri baik perempuan atau laki-laki tanpa batasan beban oleh stereotip, peran gender dan prasangka. Jika dikaitkan dengan kondisi perempuan di Indonesia tampaknya masih jauh untuk memenuhi definisi kesetaraan gender karena perempuan seringkali menghadapi hambatan yang ada di masyarakat. Maka dari itu perlunya memasukkan aspek gender disetiap program pembangunan suatu negara.

1. Faktor Kondisi Perempuan di Indonesia

Ada semakin banyak bukti bahwa memajukan kewirausahaan perempuan membawa keuntungan bagi perekonomian maupun masyarakat. Namun di Indonesia dan Kanada, perempuan kurang terwakili di usaha kecil dan menengah (UKM) serta start-up (perusahaan rintisan), akibat terhambat sejumlah tantangan internal dan eksternal yang tidak hanya menghalangi pertumbuhan bisnis mereka, tapi juga kerap menempatkan perempuan pada posisi dirugikan dibanding rekan-rekan mereka yang laki-laki. Manfaat kewirausahaan perempuan di Indonesia dan Kanada tak akan sepenuhnya terwujud tanpa upaya mengatasi hambatan ini. Dukungan kewirausahaan perempuan di Indonesia masih pada tahap dini.

Seiring dengan globalisasi yang mengakibatkan mudahnya transfer segala hal dari tempat ke tempat lainnya, isu kesetaraan gender menjadi isu yang relevan saat ini. Isu yang menyangkut dengan keterpaduan antara kerjasama perempuan dan laki-laki di segala bidang. Indonesia merupakan salah satu Negara yang sudah berkomitmen untuk menangani isu tersebut. Hal tersebut dapat dilihat diantaranya yakni Indonesia mengeluarkan INPRESS Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional yang

menginstruksikan kepada seluruh pejabat Negara, Gubernur dan Bupati untuk melaksanakan PUG diseluruh wilayah Indonesia. Meskipun hal tersebut telah dilakukan, tidak dapat dipungkiri bahwa ketimpangan gender di Indonesia masih terjadi, masih terdapat gap capaian manfaat hasil pembangunan pad a perempuan terhadap laki-laki yang terkait dengan kebutuhan dasar manusia untuk memperoleh pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan. (Sitorus, 2016)

Jumlah absolut pengusaha perempuan di Indonesia sangat tinggi. Pada tahun 2011, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memperkirakan bahwa ada 55.206.444 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di negara ini, di mana 60%, atau 33 Juta, dimiliki oleh perempuan, mewakili hampir seperempat dari tenaga kerja aktif. Global Entrepreneurship Monitor 2014 memperkirakan bahwa dari total populasi wanita dewasa di Indonesia sebesar 85 juta, seKandara 26%, atau 22 juta adalah pengusaha aktif. Walaupun perkiraan berbeda-beda karena perbedaan klasifikasi pengusaha perempuan dan data yang tidak lengkap, semua perkiraan menunjukkan tingginya jumlah pengusaha perempuan di Indonesia, dan proporsi yang sangat tinggi dari populasi perempuan dewasa yang terlibat dalam kewirausahaan. (Arsana & Alibhai, 2016)

Sebagian besar program ditujukan bagi perempuan yang bergerak dalam usaha mikro; hanya sedikit program yang fokus pada UKM dan start-up milik perempuan. Program-program yang ada umumnya didorong oleh sektor swasta (terutama perusahaan), lembaga pembangunan internasional, dan pemerintah asing. Banyak hambatan yang dihadapi pengusaha perempuan yang belum teratasi, seperti keterbatasan modal untuk UKM (sering disebut “missing middle” (bagian tengah yang hilang)), kurangnya program-program pengembangan keterampilan yang sesuai kebutuhan mereka, dan minimnya akses ke jaringan bisnis. Beban ganda sebagai ibu rumah tangga dan pelaku usaha juga menghambat keberhasilan mereka. Sebaliknya, Kanada telah menetapkan dan melaksanakan berbagai kebijakan dan program yang mendukung dan mempromosikan kewirausahaan perempuan dalam UKM dan start-up. Pemerintah di semua tingkatan, perguruan tinggi, dan sektor swasta turut mengambil bagian dalam memajukan kewirausahaan perempuan, berbagi tujuan yang sama dan bertindak sinergis, tanpa tumpang tindih peran. Pendekatan program-program ini bersifat holistik, mengatasi kebutuhan pengusaha perempuan dari tahap rintisan hingga cukup mapan, dan tersedia di

hampir semua provinsi dan wilayah. (Dea, 2019)

Sebagian besar bisnis di Indonesia berasal dari usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), yaitu 99,99 persen dari total pendirian bisnis di negara ini, dan jumlah mereka terus meningkat setiap tahun. Mayoritas perusahaan tersebar luas di seluruh daerah pedesaan, dan, oleh karena itu, cenderung memainkan peran penting dalam membantu mengembangkan keterampilan penduduk desa, tidak hanya keterampilan teknis tetapi juga kewirausahaan, terutama bagi perempuan. Namun, kebanyakan dari mereka, terutama UMK dilakukan atau dibentuk oleh rumah tangga miskin atau individu yang tidak dapat menemukan pekerjaan yang lebih baik di tempat lain, baik sebagai sumber pendapatan primer atau sekunder (tambahan) mereka. Banyak perempuan yang ditemukan melakukan bisnis mereka sendiri di UMK tidak benar-benar didorong oleh semangat kewirausahaan mereka yang tinggi tetapi terutama karena ada yang miskin dan tidak ada kegiatan penghasil pendapatan lain yang lebih baik tersedia bagi mereka. Oleh karena itu, keberadaan atau tumbuhnya UMK di Indonesia sering dianggap sebagai akibat dari pengangguran atau kemiskinan, bukan sebagai cerminan semangat kewirausahaan. (Tambunan, *Women Entrepreneurs in MSEs in*

Indonesia: Their Motivations and Main Constraints, 2017)

Diperkirakan bahwa di Indonesia hanya 23% dari Usaha Mikro Kecil (UKM) dimiliki oleh perempuan (Foundation, 2013). Hambatan sistematis terhadap kewirausahaan mencegah perempuan dari peluang ekonomi di seluruh dunia. Ini tidak hanya dapat membatasi peluang perempuan untuk memulai bisnis tetapi juga dapat membatasi bisnis yang didirikan dengan skala yang sangat kecil, seringkali hanya beroperasi di sektor informal. Kurangnya representasi perempuan sebagai pengusaha di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor. Tambunan (2009) mengidentifikasi hambatan seperti tingkat pendidikan yang rendah dan lebih sedikit kesempatan pelatihan bagi perempuan, tanggung jawab rumah tangga (terutama bagi perempuan pedesaan), kendala hukum, budaya atau agama, dan kurangnya akses ke kredit formal dan lembaga keuangan. Kurangnya waktu untuk menyelesaikan kegiatan yang menghasilkan pendapatan karena peran peduli atau tidak dibayar juga dapat membuat perempuan memiliki lebih sedikit peluang untuk mengembangkan mata pencaharian mereka sendiri dan dapat mengakibatkan kerentanan terhadap situasi yang tidak aman atau diskriminatif.

Bagi para wanita yang berusaha mengembangkan bisnis mereka, akses dan

kontrol aset keuangan telah terbukti sangat terkait dengan kekuatan pengambilan keputusan wanita dalam rumah tangga (AusAid, 2012) Tidak seperti di banyak negara berkembang lainnya, kredit mikro di Indonesia belum secara khusus ditargetkan kepada perempuan. Meskipun perempuan dianggap sebagai pasar yang penting untuk keuangan mikro, penargetan perempuan tidak pernah menjadi ciri khas industri keuangan mikro Indonesia. Proporsi rata-rata klien perempuan yang dilayani oleh lembaga keuangan mikro utama tetap cukup konstan selama 20 tahun terakhir, yang menunjukkan bahwa tidak ada peningkatan dalam akses perempuan terhadap kredit. Perkiraan dari unit Bank Rakyat Indonesia menunjukkan bahwa 25% dari peminjam kredit mikro dan nasabah tabungan mikro adalah perempuan. Salah satu kendala utama untuk akses perempuan ke kredit adalah kurangnya jaminan (ADB, 2006).

Sebagian besar pengusaha perempuan di Indonesia menggunakan tabungan pribadi dan keluarga sebagai sumber modal paling umum, Asia Foundation (2013). Namun ini juga benar, meskipun sedikit kurang, laki-laki. Data IMK 2014 menunjukkan bahwa 88% wanita membiayai bisnis mereka dengan modal sendiri dibandingkan dengan 82% pria. Tabel 4 menunjukkan bahwa untuk pemilik yang menggunakan sumber modal

lain, 37% pria menggunakan pinjaman bank dibandingkan dengan hanya 12% wanita. Lebih jauh, jika wanita meminjam untuk bisnis mereka, jumlah yang dipinjam lebih kecil. Dari responden yang tidak menggunakan pinjaman bank sebagai sumber modal, 62% wanita melaporkan bahwa alasan utamanya adalah mereka tidak tertarik untuk meminjam (dibandingkan dengan 45% pria). (AusAid, 2012)

Analisis gender menunjukkan bahwa kelompok-kelompok tersebut dirugikan karena kurangnya akses ke berbagai peluang, upaya pengembangan keterampilan, dan sumber daya produktif yang diperlukan untuk pengembangan usaha. Undang-undang yang diskriminatif, norma-norma budaya terkait dengan peran gender dalam perkawinan, serta tanggung jawab reproduktif dan pengasuhan yang tak berbayar juga berujung pada pembatasan terhadap partisipasi ekonomi perempuan. Kunci untuk mengatasi kesenjangan ini adalah analisis gender yang mengidentifikasi berbagai strategi mitigasi spesifik, kesadaran umum mengenai permasalahan kesetaraan gender, serta pemberdayaan perempuan yang menghasilkan kapasitas dan pengambilan keputusan yang lebih mantap serta peningkatan peluang. (TPSA, 2016)

2. Regim Internasional

Regim yang paling komprehensif menyamakan dengan perilaku yang terpola. Donald Puchala dan Raymond Hopkins berpendapat bahwa "sebuah rezim ada di setiap area isu substantif dalam hubungan antar negara ... Di mana pun ada keteraturan dalam perilaku, beberapa jenis prinsip, norma, atau aturan harus ada untuk menjelaskannya." "Tetapi keberadaan perilaku yang terpola saja seharusnya tidak membuat orang curiga bahwa suatu rezim bersembunyi di bawah permukaan. Definisi yang luas mengandung risiko mengacaukan pola perilaku yang diatur dengan aturan, dan hampir pasti melebih-lebihkan tingkat konsensus normatif dalam politik internasional. Membebaskan rezim dari perilaku bermotif membuat sulit untuk memutuskan bagaimana mereka memediasi, membatasi, atau memengaruhi perilaku. Istilah "rezim" kadang-kadang digunakan dengan cara deskriptif murni untuk mengelompokkan berbagai perilaku negara dalam bidang isu tertentu, tetapi karena potensi tautologi tinggi, pendekatan ini sebagian besar telah ditinggalkan. (Haggard & Simmons, *Theories of international regimes*, 1987)

Definisi Stephen Krasner yang berpengaruh mencari jalan tengah antara "ketertiban" dan komitmen eksplisit; itu menekankan dimensi normatif dari politik

internasional. Krasner mendefinisikan rezim sebagai "prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan implisit atau eksplisit di mana harapan para pelaku bertemu dalam bidang hubungan internasional tertentu." Terlepas dari kehati-hatian yang menentukan hierarki komponen yang rumit ini, "prinsip" (yang tidak hanya mencakup keyakinan fakta dan sebab-akibat, tetapi juga "kejujuran") menaungi norma-norma, "standar perilaku yang didefinisikan dalam hal hak dan kepatuhan" . " Norma, pada gilirannya, sulit dibedakan dari aturan, "keputusan khusus atau larangan untuk tindakan. (Haggard & Simmons, *Theories of international regimes*, 1987)

Regim gender internasional menetapkan indikator tercapainya kesetaraan gender dengan mengukur capaian pada aspek kesehatan, pendidikan, pendapatan keluarga, politik dan ekonomi. Beberapa pendekatan dan strategi telah dirumuskan guna mencapai kesetaraan gender, diantaranya perempuan dalam pembangunan (*Women in Development*), perempuan dan pembangunan (*women and development*) serta gender dan pembangunan (*gender and development*). Pendekatan tersebut disempurnakan dalam pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) yang disepakati pada Konferensi Perempuan se Dunia di Beijing tahun 1995.

Secara politis, pengarusutamaan gender dicapai melalui Konferensi Internasional Perempuan di Beijing tahun 1995 sebagai bagian dari Landasan Aksi (*Platform of Action*). Adopsi politis pengarusutamaan gender mengokohkan kesetaraan gender sebagai rejim internasional setelah pembentukan Komisi Status Perempuan (*the Commisison on the Status of Women*) yang diprakarsai oleh seluruh negara anggota PBB. (Dzuhayatin, 2012)

Komitmen mengenai rejim internasional yang telah disepakati oleh Kanada membentuk dasar untuk pekerjaan Global Affairs Canada dalam kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan di negara-negara mitra di seluruh dunia. Kanada memiliki reputasi internasional yang telah lama berdiri sebagai pemimpin dalam kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak perempuan dan perlindungan hak-hak mereka. Kanada meratifikasi *UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* pada tahun 1981. Pada tahun 1995, setelah adopsi *Beijing Platform for Action*, Pemerintah Kanada berkomitmen untuk melakukan Analisis Berbasis Gender (sekarang disebut *Gender-Based Analysis+*) pada semua undang-undang, kebijakan, dan program masa depan. Pendekatan Global Affairs Canada

terhadap kesetaraan gender didukung oleh Kebijakannya yang sudah lama tentang Kesetaraan Gender untuk pembangunan internasional konsisten dengan pendekatan GBA + (*gender-based analysis plus*) dan melampaui analisis hingga membutuhkan pencapaian hasil kesetaraan gender. Kanada mengambil peran kepemimpinan dalam upaya internasional untuk mengimplementasikan agenda *Women Peace and Security* (WPS). Pembangunan internasional Kanada dan bantuan kemanusiaan bekerja untuk mengimplementasikan UNSCR 1325 dan resolusi-resolusi berikutnya tentang WPS dengan memajukan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan di negara-negara yang rentan dan terkena dampak konflik. Kanada memainkan peran penting dalam mengadvokasi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan sebagai tujuan yang berdiri sendiri dalam Agenda 2030 untuk *Sustainable Development* dan terus bekerja dengan mitra yang berpikiran sama untuk secara efektif mencapai tujuan dan target kesetaraan gender.

Kanada telah berupaya menjadikan hak asasi perempuan sebagai fokus kuat *United Nations Commission on the Status of Women and Human Rights Council*. Kanada adalah salah satu negara pertama yang meratifikasi CEDAW, yang

menetapkan standar internasional untuk menghapus diskriminasi gender. Pada tahun 2002, Kanada meratifikasi *Canada ratified the Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*, yang diadopsi oleh UN General Assembly pada tahun 2000. (Canada, 2017)

Kesimpulan

Dengan adanya proyek TPSA yang memiliki pendekatan terhadap pengarusutamaan gender menghasilkan hasil yang signifikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hasil langsung yang dapat dirasakan yakni meningkatnya kesadaran akan masalah gender dan perdagangan di antara para pemangku kepentingan, peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam penggunaan teknologi digital dalam pemasaran, peningkatan akses ke informasi tentang sumber modal dan pasar oleh UKM yang dipimpin perempuan, serta smeningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri dalam kepemimpinan perempuan. Hasil tidak langsung yang diperoleh diantaranya yaitu peningkatan profitabilitas bisnis UKM yang dipimpin wanita, peningkatan akses ke modal oleh UKM yang dipimpin wanita, peningkatan dukungan oleh para pemimpin koperasi untuk meningkatkan keanggotaan dan kepemimpinan perempuan dalam koperasi.

Karena dua faktor mempengaruhi Kanada untuk memasukkan aspek gender pada bantuan pembangunan, ada faktor internal yang berdasarkan pada hipotesis pertama terdapat pengaruh politik perempuan, feminisme serta undang-undang konstitusi Kanada. Ada beberapa bukti yang ditunjukkan di departemen pengambilan keputusan Kanada, dan politik perempuan mengambil peran dalam pengambilan keputusan itu. Politik perempuan memiliki peran besar, pada gilirannya, fokus kebijakan luar negeri Kanada tentang kesetaraan gender dalam bantuan pembangunan *Canada-Indonesia Trade and Private Sector Assistance* dari 2014 hingga 2019. Perdana Menteri Justin Trudeau dan Chrystia Freeland sebagai politik perempuan serta Menteri Luar Negeri Kanada yang telah berkontribusi untuk membuat keputusan yang berfokus pada kesetaraan gender. Alasan mengapa Justin Trudeau dan Chrystia Freeland memiliki peran dalam mempengaruhi bantuan pembangunan Kanada untuk Indonesia yang berfokus pada gender terlihat dalam latar belakang nilai-nilai yang dimiliki. Politik Chrystia Freeland Latar belakang politik Chrystia Freeland adalah Menteri Perempuan, dan Justin Trudeau selalu memperjuangkan hak-hak perempuan dan berusaha menunjukkan keseriusannya dengan membuat kebijakan yang sejalan dengan visi misinya.

Kebijakan seperti kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan menjadi prioritas dalam bantuan Kanada 2014

Faktor internal bukan hanya karena pengaruh politisi perempuan, tetapi juga karena perilaku sosial. Perilaku tersebut terkait dengan pemikiran wanita Kanada tentang politik. Karena itu, gerakan perempuan yang memperjuangkan hak-hak perempuan dalam bidang politik, ekonomi dan sosial didirikan. Dapat dilihat sejak tahun 1900-an bahwa perempuan berjuang untuk memiliki hak suara dalam pemilihan federal yang diberikan, dan peran mereka dalam politik telah meningkat sehingga perempuan dapat duduk di parlemen. Gerakan perempuan di Kanada akhirnya dapat mempengaruhi pemerintah untuk memperhatikan masalah perempuan dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam politik. Platform gerakan perempuan sangat ditunjukkan dalam Dekade PBB untuk Perempuan dari tahun 1975 hingga 1985. Terlebih lagi, gerakan perempuan di Kanada telah mencapai keberhasilannya yang dapat dilihat bahwa pemerintah Kanada mengeluarkan Anggaran Perempuan yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah perempuan kemudian ranking Kanada mengalami kenaikan dalam kesetaraan gender. Faktor eksternal dalam tesis ini terlihat di Indonesia, di mana perempuan adalah

kelompok yang sulit memiliki akses dan kesempatan dalam ekonomi dan investasi. Dianggap bahwa ketimpangan pembangunan manusia masih dihadapi oleh perempuan, dan itu membuktikan bahwa ada kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, kondisi perempuan Indonesia layak menerima bantuan pembangunan dari Kanada terutama pada tahun 2014 hingga 2017.

Sebagai kesimpulan, penulis telah memberikan bukti kuat untuk membuktikan hipotesis pada bab penulis dan memenangkan pertanyaan penelitian tentang tesis ini dijawab. Selain itu, analisis diharapkan akan memberikan lebih banyak bukti yang penulis buat membuat hipotesis seperti faktor internal dan eksternal. Namun, pertanyaan kompilasi penelitian telah dijawab, pertanyaan penulis tentang kelanjutan bantuan pembangunan tidak hanya berhenti pada 2019 karena ruang diskusi skripsi ini terfokus. Karena bantuan pembangunan yang mendukung pada kesetaraan gender ke Indonesia dapat membantu Indonesia dalam meningkatkan program pembangunan.

REFERENSI

- Conference Board of Canada. (n.d.). *Projects*. Retrieved Oktober 25, 2019, from conferenceboard.ca: https://www.conferenceboard.ca/topics/trade_international/intl-cooperation/intl-project.aspx
- ADB. (2006). *INDONESIA - Country gender Assessment*. Asian Development Bank, Southeast Asia Regional Department Regional and Sustainable Development Department. Manila: Asia Foundation, Asian Development Bank, Canadian International Development Agency, National Democratic Institute, The World Bank.
- Apellániz, M. S., Núñez, M., & Charlo-Molina, M. J. (2012). Women and Globalization. In C. Wankel, & S. Malleck (Eds.), *Ethical Models and Applications of Globalization: Cultural, Socio-Political and Economic Perspectives* (p. 119). Hershey, Pennsylvania, Amerika Serikat: Business Science Reference (an imprint of IGI Global).
- Arsana, I. P., & Alibhai, A. S. (2016). *Women entrepreneurs in Indonesia : a pathway to increasing shared prosperity*. Jakarta: World Bank .
- AS, B. (2018, Maret 6). The Study of Foreign Policy in International Relations. *Journal of Political Sciences & Public Affairs*, 6(4), 1.
- AusAid. (2012). *Empowering Indonesian Women for Poverty Reduction (MAMPU): Program Design Document*. Canberra: Australia Government.
- Azizah, N. (2017). *Gender dan Politik*. (d. Ahmad Sahide, Ed.) Yogyakarta, DIY, Indonesia: The Phinisi Press.
- Bennett, D. (2015, Mei 9). *Young MLAs, many of them female, will soon rule in Alberta*. Retrieved November 10, 2019, from thestar.com: <https://www.thestar.com/news/canada/2015/05/09/young-mlas-many-of-them-female-will-soon-rule-in-alberta.html>
- Brown, K., Huckerby, J., & Shepher, L. J. (2019). *GUIDANCE NOTE GENDER MAINSTREAMING PRINCIPLES, DIMENSIONS AND PRIORITIES FOR PVE*. (L. Pasqual, Ed.) New York: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women).
- Canada. (2017, Juni 7). *Framework for Assessing Gender Equality Results*. Retrieved November 10, 2019, from canada.ca: https://www.international.gc.ca/world-monde/funding-financement/framework-cadre.aspx?lang=eng&_ga=2.144136307.777479080.1574870907-1778672460.1571992750#a3
- Canada. (2017, Oktober 25). *Rights of women*. Retrieved November 10, 2019, from canada.ca: <https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/rights-women.html>

- Canada. (2019, Juli 8). *Canada's Feminist International Assistance Policy*. Retrieved November 10, 2019, from international.gc.ca: https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/priorities-priorites/policy-politique.aspx?lang=eng
- Canada. (2019, April). *Project profile — Canada-Indonesia Trade and Private Sector Assistance*. Retrieved April 28, 2019, from Canada.ca: <https://w05.international.gc.ca/projectbrowser-banqueprojets/project-projet/details/D000352001>
- Carpenter, J. (2018, November 12). *Justin Trudeau is a feminist. For him, that's a given*. Retrieved November 10, 2019, from cnn.com: <https://edition.cnn.com/2018/11/12/success/justin-trudeau-feminism/index.html>
- CBC. (2018, Juni 20). *Kim Campbell becomes Canada's first woman prime minister*. Retrieved November 10, 2019, from cbc.ca#: <https://www.cbc.ca/archives/kim-campbell-becomes-canada-s-first-woman-prime-minister-1.4674672>
- Conference Board of Canada. (n.d.). *International Cooperation*. Retrieved Oktober 25, 2019, from conferenceboard.ca: https://www.conferenceboard.ca/topics/trade_international/intl-cooperation.aspx
- Dea, V. (2019). *Ikhtisar Dukungan untuk Pengusaha Perempuan di Indonesia dan Kanada: Fokus pada UKM dan Strat-up (Perusaha Rintisan)*. Jakarta: TPSA.
- Diebel, L. (2015, November 29). *How Chrystia Freeland became Justin Trudeau's first star*. Retrieved November 10, 2019, from thestar.com: <https://www.thestar.com/news/insight/2015/11/29/how-chrystia-freeland-became-justin-trudeaus-first-star.html>
- Djelantik, S. (2009). Gender dalam Hubungan Internasional. In Asrudin, & M. J. Suryana, *Refleksi Teori Hubungan Internasional dari Tradisional ke Kontemporer* (Pertama ed., p. 243). Yogyakarta, DIY, Indonesia: Graha Ilmu.
- Dzuhayatin, S. R. (2012, Juli). KESETARAAN GENDER: Kontestasi Rezim Internasional dan Nilai Lokal. *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 11, 147-148.
- Embassy of the Republic of Indonesia. (2012). *Friendship Beyond Borders: Celebrating Sixty Years of Indonesian-Canadian Diplomatic Relations*. (E. McIninch, Ed.) Ottawa – Jakarta, Canada: Embassy of the Republic of Indonesia, 55 Parkdale Avenue, Ottawa, Canada.
- Embassy of The Republic of Indonesia. (2018). *Bilateral Relations*. Retrieved Oktober 20, 2019, from indonesia-ottawa.org: http://www.indonesia-ottawa.org/bilateral_relations/

- fundsforngos. (n.d.). *Canadian International Development Agency (CIDA)*. Retrieved Oktober 25, 2019, from fundsforngos.com: <https://www.fundsforngos.org/bilateral-funds-for-ngos/canadian-international-development-agency-cida/>
- Gerster, J. (2019, September 29). *How much did feminist Trudeau move the needle on gender equality?* Retrieved November 15, 2019, from globalnews.ca: <https://globalnews.ca/news/5887685/trudeau-feminism-equality/>
- Government of Canada. (2017, Juni 7). *Mainstreaming of a Gender Perspective*. Retrieved Juni 2019, from international.gc.ca: <https://www.international.gc.ca/world-monde/funding-financement/mainstream-integration.aspx?lang=eng>
- Haggard , S., & Simmons, B. A. (1987). *Theories of international regimes*. Cambridge University Press.
- Kassenaar , L., & Wingrove, J. (2015, November 5). *Feminist Trudeau Names Women to Half of Posts in New Cabinet*. Retrieved November 10, 2019, from bloomberg.com: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-11-04/feminist-trudeau-to-name-women-to-half-the-posts-in-new-cabinet>
- Kemendag. (2018). *Kemendag Tingkatkan Peran Perempuan Pengusaha Indonesia*. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional. Jakarta: Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Perdagangan.
- Kernerman, G., & Resnick, P. (2005). *Insiders and Outsiders: Alan Cairns and the Reshaping of Canadian Citizenship*. Vancouver: UBC Press.
- Lawson, G. (2015, Desember 8). *Trudeau's Canada, Again: With support from President Obama and the legacy of his father on his side, Justin Trudeau sets out to redefine what it means to be Canadian*. Retrieved November 10, 2019, from New York Times: https://www.nytimes.com/2015/12/13/magazine/trudeaus-canada-again.html?_r=0
- Live&Learn. (2016, November 21). *Canadian cultural values and beliefs*. Retrieved November 10, 2019, from <https://livelearn.ca/article/about-canada/canadian-cultural-values-and-beliefs/>
- Narain, S. (2014). Gender in International Relations: Feminist Perspectives of J. Ann Tickner. *Indian Journal of Gender Studies*, 182.
- Neack, L. (2008). *The New Foreign Policy: Power Seeking in a Globalized Era* (kedua ed.). Lanham, Maryland, USA: Rowman & Littlefield Publishers.
- OECD. (2018). *Gender equality in Canada Mainstreaming, Governance and Budgeting Highlights 2018*. OECD.
- Rouillard, C.-A., & Lalancette, M. (2019, November 10). *Trudeau's new cabinet: Gender parity because it's 2019? Or due to competence?* Retrieved November 20, 2019, from

theconversation.com: <http://theconversation.com/trudeaus-new-cabinet-gender-parity-because-its-2019-or-due-to-competence-126646>

Sitorus, A. V. (2016, Januari - April). DAMPAK KETIMPANGAN GENDER TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *Sosio Informa*, 2, 90.

Snyder, R. C., Sapin, B., & Bruck, H. W. (2002). *Foreign*. New York, USA: PALGRAVE MACMILLANT.

Soetjipto, A., & dkk. (2013). *Gender dan Hubungan Internasional Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Jalasutra.

Tambunan, T. T. (2017). Women Entrepreneurs in MSEs in Indonesia: Their Motivations and Main Constraints. *Journal of Women's Entrepreneurship and Education* , 57-58.

Tambunan, T. T. (2017). Women Entrepreneurs in MSEs in Indonesia: Their Motivations and Main Constraints . *Journal of Women's Entrepreneurship and Education*, 61.

TPSA. (2016). *Proyek TPSA Melaksanakan Pertemuan Awal untuk Gender and Trade Dialogue Group*. Jakarta: TPSA.

TPSA. (n.d.). *Kegiatan Lalu*. Retrieved Oktober 25, 2019, from [tpsaproject.com: https://www.tpsaproject.com/kegiatan-lalu/?lang=id](https://www.tpsaproject.com/kegiatan-lalu/?lang=id)

TPSA. (n.d.). *Kesetaraan Gender*. Retrieved September 18, 2019, from CANADA–INDONESIA TRADE AND PRIVATE SECTOR ASSISTANCE PROJECT: <https://www.tpsaproject.com/publikasi/kesetaraan-gender/?lang=id>

TPSA. (n.d.). *Tentang TPSA*. Retrieved Oktober 25, 2019, from [tpsaproject.com: https://www.tpsaproject.com/tentang-kami/tentang-tpsa/?lang=id](https://www.tpsaproject.com/tentang-kami/tentang-tpsa/?lang=id)

UNIDO. (2013). *TRADE CAPACITY BUILDING: Resource Guide*. Retrieved April 28, 2019, from [tcbresourceguide.org: http://www.tcbresourceguide.org/vol2/bilateral_services/supply_capacity/canada.html](http://www.tcbresourceguide.org)

United Nations. (n.d.). *UN Women*. Retrieved Juni 14 , 2019, from [un.org: https://www.un.org/womenwatch/osagi/gendermainstreaming.htm](https://www.un.org/womenwatch/osagi/gendermainstreaming.htm)

Weert, P. M. (1979). *The Politics Of Canada's Foreign Aid Programme: Indonesia-A Case Study*. Hamilton, Canada: McMaster University.

WHO. (2019). *The Canadian International Development Agency - CIDA*. Retrieved Oktober 25, 2019, from WHO: https://www.who.int/workforcealliance/members_partners/member_list/cida/en/

Williams, O. (2019, Oktober 24). *Here's who will be in Caroline Cochrane's NWT cabinet*. Retrieved November 10, 2019, from [cabinradio.ca: https://cabinradio.ca/24459/news/politics/heres-who-will-be-in-caroline-cochranes-nwt-cabinet/](https://cabinradio.ca/24459/news/politics/heres-who-will-be-in-caroline-cochranes-nwt-cabinet/)

